

# PANDUAN

## **PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN RESPONSIF JENDER**

Oleh

**Sindung Haryanto  
Handi Mulyaningsih**

**KELOMPOK KAJIAN JENDER DAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2004**

## PENGESAHAN KARYA ILMIAH

1	Judul Karya Ilmiah	:	Panduan Penyusunan Rencana Program Pembangunan Responsif Gender
	Bidang Ilmu	:	Sosial
2	Penulis	:	
	a. Nama dan gelar	:	Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si
	b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
	c. NIP	:	131815747
	d. Pangkat/Golongan	:	Pembina/Iva
	e. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	f. Jabatan Struktural	:	-
	g. Fakultas/Jurusan	:	FISIP/Sosiologi

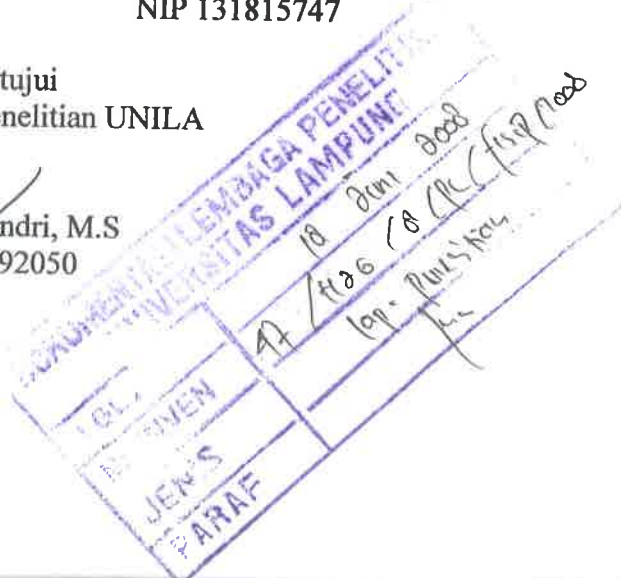
Bandar Lampung, Juni 2008  
Penulis

Mengetahui  
Dekan FISIP UNILA  
Drs. Hertanto, M.Si  
NIP 131610962

Dra. Handi Mulyaningsih M.Si  
NIP 131815747

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian UNILA

Dr. John Hendri, M.S  
NIP 131692050



Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Sindung Haryanto dan Handi Mulyaningsih**

**Penyusunan Rencana Program Pembangunan Responsif Jender**

**Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2004**

**x, 124 hlm.; 16 x 21 cm.**

**ISBN 979-8287-64-9**

**Copy right © pada Penulis**

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang*

*Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun  
tanda izin tertulis dari Penulis*

**Penerbit Universitas Lampung  
Cetakan Pertama, April 2004**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan Kehadlirat Alloh S.W.T., karena hanya berkat Karunia-Nya lah, panduan Penyusunan Rencana Program Pembangunan Responsif Jender ini dapat diselesaikan. Panduan ini terutama diperuntukkan bagi dinas instansi baik di tingkat daerah kabupaten/kota maupun propinsi, dalam rangka penyusunan program /kegiatan pembangunan yang responsif jender.

Panduan ini disusun berdasarkan besarnya permintaan dari kalangan instansi pemerintah akan adanya sebuah panduan yang dapat diaplikasikan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Bahan-bahan yang digunakan dalam penyusunan panduan ini berasal dari berbagai sumber antara lain adalah modul Pelatihan Pengarusutamaan Jender dalam Perencanaan Pembangunan yang telah disusun oleh Kelompok Kajian Jender dan Pembangunan FISIP, Universitas Lampung. Modul tersebut telah diujicobakan pada pelatihan Pengarusutamaan Jender dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara.

Panduan ini disusun berkat kerjasama antara Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan R.I. dengan Kelompok Kajian Jender dan Pembangunan FISIP Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih Kepada pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya buku panduan ini. Penyusun menyadari bahwa, buku panduan ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu segala kritik dan saran yang membangun, sangat kami harapkan dari sidang pembaca. Akhirnya, penyusun masih berharap, semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi sidang pembaca, amin.

**Bandar Lampung, 23 April 2004**

**Tim Penyusun**

**Sindung Haryanto**

**Handi Mulyaningsih**

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
PENDAHULUAN .....	ix
<b>AB 1 KONSEP DASAR JENDER</b> .....	1
A. Pengertian Jender .....	1
B. Pengertian Jenis Kelamin .....	2
C. Berbagai Pengertian yang Terkait dengan Jender .....	3
D. Perbedaan Jender dan Jenis Kelamin .....	7
<b>AB 2 KESETARAAN DAN KETIDAKADILAN JENDER</b> .....	8
A. Pengertian Kesetaraan Jender .....	8
B. Pengertian Ketidakadilan jender .....	12
C. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Jender .....	13
D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Ketidakadilan Jender .....	17
E. Strategi Mengurangi Ketidakadilan Jender .....	23
<b>AB 3 PROGRAM PEMBANGUNAN RESPONSIF JENDER</b> .....	29
A. Pengertian .....	29
B. Apa yang Diperlukan ? .....	30
C. Tahap-tahap Penyusunan Rencana Program .....	41
	v

<b>BAB 4</b>	<b>ALAT ANALISIS JENDER .....</b>	<b>47</b>
	A. Pengantar .....	47
	B. Pengertian .....	48
	C. Teknik-teknik Analisis Jender .....	49
<b>BAB 5</b>	<b>DATA TERPILAH JENDER .....</b>	<b>64</b>
	A. Pengantar .....	64
	B. Pengertian .....	65
	C. Contoh Data <i>Gender Blind</i> .....	66
	D. Contoh Data Terpilah Jender .....	68
	E. Teknik Pengumpulan Data Terpilah Jender Kuantitatif .....	71
	F. Teknik Pengumpulan Data Terpilah Jender Kualitatif .....	73
<b>BAB 6</b>	<b>INDIKATOR RESPONSIF JENDER .....</b>	<b>84</b>
	A. Pengertian .....	84
	B. Jenis-jenis indikator .....	85
	C. Prinsip Penyusunan Indikator Responsif Jender .....	87
	D. Asumsi yang Dipakai .....	89
	E. Contoh Indikator Responsif Jender .....	92
<b>BAB 7</b>	<b>APLIKASI <i>GENDER ANALYSIS PATHWAY</i> .....</b>	<b>104</b>
	A. Pengertian .....	104
	B. Alur Kerja Analisis Jender .....	105
	C. Aplikasi <i>Gender Analisis Pathway</i> dalam Rencana Program .....	111

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Perbedaan Jenis Kelamin .....	3
2 Perbedaan antara Jender dan Jenis Kelamin .....	7



## PENDAHULUAN

alam rangka membangun warga negara Republik Indonesia yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara secara setara dan dalam suasana yang berkeadilan maka diperlukan suatu strategi yang tepat dan dapat dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, pengarusutamaan jender adalah strategi yang mengintegrasikan konsep kesetaraan dan keadilan jender kedalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan sektor pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota. Disamping itu perlu pula dilakukan upaya yang terus menerus dalam memberikan pemahaman tentang analisis jender yang merupakan proses dalam menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang status laki-laki dan perempuan sampai tindak lanjut yang dirancang dan merupakan aplikasi rencana aksi (*plan of action*) untuk dapat mengintegrasikan kegiatan kedalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Rencana aksi ini mengacu pada kebijakan yang tercantum pada GBHN, Propenas, Propeda, Repeta dan Repetada sebagai upaya peningkatan kualitas perempuan untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki: tentang posisi, kondisi dan kedudukan perempuan dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan pada lembaga-lembaga publik/instansi/pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif maupun pada organisasi-organisasi politik/partai politik, serikat buruh maupun dalam keluarga.

Perencanaan pembangunan berperspektif jender pada dasarnya adalah upaya untuk mentransformasikan pengarusutamaan jender ke dalam kegiatan nyata institusi sektor. Inti dari perencanaan berperspektif jender adalah mengintegrasikan permasalahan diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan ke dalam seluruh komponen perencanaan pembangunan. Komponen perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah kebijakan, program atau proyek dan kegiatan. Dengan demikian kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan peningkatan peran serta partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan dapat diakomodasikan secara proporsional ke dalam kepentingan dan tujuan pembangunan pada institusi sektor.

Hasil akhir yang diinginkan dari pembangunan berperspektif jender adalah keadilan dan kesetaraan jender dalam segenap aspek kehidupan. Dengan demikian menjadi suatu hal yang wajar jika keadilan dan kesetaraan jender juga menjadi salahsatu tolok ukur kinerja suatu institusi sektor dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan, program/proyek dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya untuk dapat menilai/mengevaluasi apakah suatu kegiatan pembangunan telah berperspektif jender atau belum, diperlukan indikator yang responsif jender. Indikator ini baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif digunakan untuk memonitor perkembangan kesetaraan dan keadilan jender dan dapat dipakai untuk mengukur dampak dari suatu intervensi atau strategi tertentu terhadap kesetaraan dan keadilan jender. Sehingga melalui indikator perencanaan berwawasan jender berikut pelaksanaannya dapat dievaluasi. Oleh karena itu kejelasan, kelengkapan dan keobyektivan dari indikator tersebut akan memudahkan dalam memonitor perkembangan dan mengevaluasi tingkat keberhasilan penerapan perencanaan pada program/proyek atau kegiatan pembangunan.

# BAB 1

## KONSEP DASAR JENDER

### A. Pengertian Jender

Ketika laki-laki dan perempuan dilahirkan, ada hal-hal yang memang berbeda. Perbedaan yang dapat dilihat ketika lahir adalah sesuatu yang bersifat biologis yakni pada alat kelamin. Selanjutnya, perempuan memiliki payudara, mengalami haid, memproduksi sel telur, mengandung, dan melahirkan, sementara laki-laki memproduksi sperma. Perbedaan ini sama sekali tidak dapat dipertukarkan satu sama lain dan perbedaan-perbedaan tersebut nampak ketika anak sudah menginjak usia dewasa (akil balig).

Sedangkan beberapa label sosial (jender) yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan, seperti perempuan itu irasional, emosional, lemah, lembut, tergantung, cengeng, cantik dan seterusnya. Dan sebaliknya laki-laki itu rasional, kuat, tegas, tegar, jantan, dan seterusnya, sama sekali tak dapat dilihat ketika bayi laki-laki dan perempuan lahir. Bayi laki-laki atau bayi perempuan memiliki sifat dan perilaku yang sama: menangis, tertawa dan lainnya yang tidak dapat dibedakan. Aspek-aspek femininitas mulai tampak ketika orangtua memikirkan tentang jenis pakaian, mainan, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Berdasarkan norma masyarakat tentang pola asuh ini, akhirnya orangtua menggiring anak laki-laki memiliki sifat maskulin yang dominan sementara anak perempuan memiliki sifat feminim yang dominan.

Beberapa elemen penting dalam konsep jender:

1. Status jender ditentukan secara sosio kultural. Hanya karena seseorang dilahirkan menjadi perempuan atau laki-laki, dia kemudian diberi peran dan tugas yang berbeda. Karena itu, berbeda dengan ciri-ciri biologis, peran jender berbeda dari konteks budaya ke budaya lainnya. Umur, ras, dan kondisi ekonomi adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan dan peran jender. Jender itu dipelajari dan berubah dari waktu ke waktu.
2. Jender merujuk pada hubungan kekuasaan antara wanita dan pria, yang pada umumnya menguntungkan pria.
3. Hubungan kekuasaan yang tidakimbang telah menyebabkan subordinasi status wanita.
4. Subordinasi status wanita kemudian dipelihara dan dilanggengkan melalui pembagian jender yang tidak adil atas akses dan kontrol sumberdaya.

## **B. Pengertian Jenis Kelamin**

Jender berbeda dengan jenis kelamin. Jender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggungjawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Dengan kata lain jender merupakan hasil konstruksi sosial budaya tentang peran, fungsi, hak dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan. Meskipun sulit, konstruksi sosial budaya tersebut pada dasarnya dapat berubah dan dapat dipertukarkan satu sama lain. Sementara itu jenis kelamin (seks) adalah perbedaan fisik biologis, yang mudah dilihat melalui ciri fisik primer dan secara sekunder yang ada pada kaum laki-laki dan perempuan.

abel 1 Perbedaan Jenis Kelamin

	Laki-laki	Perempuan
Ciri-ciri Utama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penis</li><li>• Zakar (buah pelir)</li><li>• Sperma/mani</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vagina (lubang senggama)</li><li>• Sel telur</li><li>• Payudara</li></ul>
Ciri Tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jakun</li><li>• Kumis dan Janggut</li><li>• Dada bidang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kulit halus</li><li>• Pinggul Besar</li></ul>

## 2. Berbagai Pengertian yang Terkait dengan Jender

berbagai pengertian yang terkait dengan jender:

**Pembagian kerja atas jender**, adalah pembagian kerja yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya yang menganggap bahwa perempuan dianggap cocok untuk jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu, demikian juga laki-laki. Karena perempuan menstruasi, hamil dan melahirkan maka pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pemeliharaan anak dianggap cocok untuk perempuan sementara pekerjaan mencari nafkah dianggap cocok untuk laki-laki meskipun sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah.

**Status jender**, adalah posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang ditentukan secara sosial budaya. Dalam berbagai konteks masyarakat sosial budaya, status jender perempuan pada umumnya lebih rendah dibanding laki-laki. Banyak contoh istilah dan praktek kehidupan yang menunjukkan bahwa status perempuan lebih rendah dari laki-laki. Misalnya "*konco wingking*" dalam bahasa Jawa. Adat yang menghendaki istri berjalan di belakang suami, nama istri yang harus mengikuti nama suami, istri adalah perhiasan suami, dan sebagainya menunjukkan pada umumnya status jender meletakkan perempuan pada posisi subordinat laki-laki.

3. **Peran jender**, adalah perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersumber dari perbedaan status jender. Sebagai contoh perempuan bukanlah pencari nafkah karena statusnya adalah ibu rumahtangga, sementara laki-laki statusnya adalah pencari nafkah karena dia adalah kepala keluarga. Peran reproduksi sosial adalah peran yang harus diemban laki-laki karena laki-laki adalah pemimpin sementara perempuan tidak cocok berperan dalam reproduksi sosial karena dia harus merawat keluarga di rumah, bukan di luar rumah.
4. **Bias Jender**, adalah suatu cara pandang yang dipengaruhi oleh pendapat yang memihak pada satu kategori jender atau menganggap bahwa perbedaan jender itu tidak ada. Sebagai contoh cara pandang yang menganggap bahwa semua kegiatan pembangunan akan mempunyai akibat yang sama baik laki-laki maupun perempuan (dengan demikian tidak mengenali bahwa berbagai sebab perempuan tidak dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana laki-laki menikmatinya), atau pendapat yang menyatakan bahwa perempuan tidak cocok menjadi pemimpin karena pemimpin haruslah laki-laki.
5. **Pelabelan jender (*gender stereotyping*)**, adalah pemberian atribut-atribut tertentu pada masing-masing kategori jender yang pada umumnya merugikan. Sebagai contoh: perempuan itu cengeng, emosional, lemah, tidak mandiri, tidak stabil, submisif sementara laki-laki itu kasar, agresif, kejam, dominan.

Pembedaan-pembedaan itu pada akhirnya diyakini sebagai sesuatu yang terberi dan pada akhirnya dianggap sebagai kodrat. Oleh karena dianggap sebagai kodrat maka laki-laki maupun perempuan mengidentifikasi dirinya sebagaimana masyarakat mengidentifikasi mereka. Bila label-label sosial untuk anak laki-laki dan perempuan muncul melalui pola asuh dan konstruksi masyarakat, masihkah dianggap sebagai kodrat? Pertanyaan tersebut penting diajukan karena atas dasar argumentasi bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki itu bersifat kodrati, perempuan seringkali diperlakukan berbeda dari laki-laki. Coba perhatikan beberapa hal di bawah ini.

*Pertama*, tak ada yang menyangkal bahwa dalam masyarakat kita, perempuan dinormorduakan (disubordinasi) dalam pengambilan keputusan. Bahkan, kadang-kadang untuk urusan bersama (laki-laki dan perempuan), perempuan tidak diajak bicara. Akibatnya perempuan tidak dapat mengontrol apabila keputusan itu tidak menguntungkan atau malah merugikan mereka.

*Kedua*, perempuan tidak memiliki kesempatan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi, sehingga perempuan secara ekonomi terpinggirkan atau termarginalisasikan. Di pabrik-pabrik atau di kantor-kantor, sebagian besar perempuan bekerja di kelas rendahan dan otomatis gajinya juga lebih rendah dari laki-laki. Tidak saja soal gaji, persoalan kesejahteraan yang lain seperti tunjangan, perempuan sering diperlakukan secara berbeda.

*Ketiga*, perempuan karena keperempuannya sering mendapat label negatif, misalnya, perempuan itu penggoda, *konco wingking* (berperan di belakang atau di sektor domestik), *swarga nunut neroko katut* (seluruh kehidupan perempuan akan sangat tergantung kepada laki-laki), cerewet dan seterusnya.

*Keempat*, perempuan juga sering menjadi korban kekerasan baik di wilayah privat atau di wilayah publik seperti kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, perkosaan, maupun pelecehan seksual (*sexual harrasement*).

*Kelima*, dalam keluarga perempuan sering mempunyai beban pekerjaan yang jauh lebih berat dari laki-laki akan tetapi hasil kerja perempuan seringkali tidak dihargai seperti pekerjaan laki-laki. Bahkan, dalam kehidupan modern, perempuan memiliki beban pekerjaan yang semakin berlipat. Di satu sisi, mereka dituntut harus bersaing dengan laki-laki dalam peran-peran publik sementara tugas tradisional sebagai ibu rumah tangga tidak pernah dibagi dengan laki-laki. Akibatnya, banyak perempuan yang terjangkit sindrom *superwoman* atau perempuan super.

Lima hal tersebut secara gamblang menggambarkan betapa perbedaan itu telah melahirkan ketidakadilan atau yang lumrah disebut sebagai ketidakadilan jender. Karenanya patut dipersoalkan, serandainya perbedaan perlakuan tidak berakibat pembedaan perlakuan mungkin kesetaraan jender tidak disuarakan sekeras seperti sekarang.

Ketika ditemukan fakta bahwa ketidakadilan yang menimpa masyarakat berakar pada pembagian peran sosial perempuan dan laki-laki maka upaya menciptakan kesetaraan jender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat menjadi keharusan. Karena kalau tidak, proses perendahan martabat kemanusiaan akan terus berlangsung dalam masyarakat. Kesetaraan jender artinya, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan karena jenis kelaminnya, sebaliknya laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk maju dan berkembang secara sama, tidak ada jenis kelamin yang lebih utama atau diprioritaskan.

Kesetaraan jender merupakan syarat mutlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh sebab itu tidak benar anggapan bahwa gerakan kesetaraan jender merupakan upaya untuk merusak tatanan masyarakat yang telah baku. Yang benar adalah kesetaraan jender merupakan upaya menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Tidak benar anggapan bahwa gerakan kesetaraan jender merupakan upaya perempuan melawan laki-laki. Yang benar adalah upaya laki-laki dan perempuan melawan sistem yang tidak adil. Tidak benar pula anggapan bahwa gerakan kesetaraan gender merupakan gerakan melawan agama. Yang benar adalah merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai asasi yang diajarkan agama yaitu keadilan. Dan tidak benar bahwa gerakan kesetaraan jender merupakan gerakan dari Barat. Yang benar adalah upaya kritik terhadap tatanan berbagai masyarakat tanpa membedakan letak geografis (Barat atau Timur). Akhirnya kesetaraan jender layak untuk didukung siapa saja termasuk melalui kebijakan negara, seperti kebijakan *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan jender, artinya kebijakan yang mengharuskan negara mengintegrasikan perspektif jender dalam keseluruhan kebijakan. Kecuali bila negara atau siapa saja tetap menginginkan proses perendahan martabat kemanusiaan terus berlangsung.



## D. Perbedaan antara Jender dan Jenis Kelamin

Tabel 2 Perbedaan antara Jender dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Contoh	Gender	Contoh
Tidak dapat berubah	Alat kelamin laki-laki dan perempuan	Dapat berubah	Peran-peran dalam kegiatan sehari-hari, seperti lebih banyak perempuan jadi juru masak jika di rumah, tetapi jika di restoran lebih banyak laki-laki jadi juru masak
Tidak dapat dipertukarkan	Jakun pada laki-laki dan payudara pada perempuan	Dapat dipertukarkan	
Berlaku sepanjang masa	Status sebagai laki-laki dan perempuan	Tergantung budaya dan kebiasaan	Di pulau Jawa pada jaman penjajahan Belanda, kaum perempuan tidak memperoleh hak pendidikan. Setelah Indonesia merdeka perempuan mempunyai kebebasan mengikuti pendidikan
Berlaku dimana saja berada	Di rumah, di kantor atau dimanapun seorang laki-laki atau perempuan tetap laki-laki atau perempuan	Tergantung budaya setempat	Pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan dikarenakan budaya setempat antara lain: diutamakan untuk perawat, guru TK, pengasuh anak.
Merupakan kodrat Tuhan	Laki-laki memiliki ciri utama yang berbeda dengan ciri perempuan	Bukan Merupakan Kodrat Tuhan	Pengaturan jumlah anak dalam suatu keluarga

## BAB 2

# KESETARAAN DAN KETIDAKADILAN JENDER

### A. Pengertian Kesetaraan Jender

Kesetaraan jender mempunyai pengertian sebagai suatu kondisi dimana perempuan memiliki posisi, status, serta peran yang sama dengan pria. Dengan kata lain kesetaraan jender adalah suatu kondisi ketidakadaan jurang (*gap*), diskriminasi dan ketidakadilan antara perempuan dan pria dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam rumahtangga maupun masyarakat dan negara.

Secara teoritis kesetaraan jender dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. **Setara tapi terpisah.** Dalam kondisi ini perempuan mempunyai posisi sejajar dengan laki-laki, tapi keduanya tidak memiliki hubungan fungsional, keduanya memiliki dunia yang terpisah. Feminisme radikal pada umumnya meng-inginkan "dunia yang terpisah" ini agar perempuan dapat keluar dari "eksploitasi hubungan yang tidakimbang" dengan laki-laki.
2. **Setara komplementer.** Bentuk ini ditandai dengan kesejajaran posisi dan masing-masing saling melengkapi. Konsep jender terbaru yang dtuangkan dalam GBHN mendekati bentuk ini.

3. Tidak setara tak terpisah. Dalam hal ini perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dari laki-laki, dan apa yang dilakukannya dianggap sebagai pelengkap apa yang dilakukan laki-laki.
4. Tidak setara terpisah. Perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki dan keduanya tidak mempunyai hubungan fungsional.

Dimensi-dimensi kesetaraan jender meliputi partisipasi, akses, kontrol dan manfaat. Kesetaraan jender dalam arti partisipasi berarti adalah perempuan dapat melakukan segala aktivitas kehidupan yang diinginkannya tanpa kecuali, baik aktivitas dalam rumah, aktivitas kerja/ekonomi, aktivitas sosial kemasyarakatan, keagamaan, politik. Partisipasi yang paling penting bagi kesetaraan jender adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan (dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara). Jika perempuan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kebijakan-kebijakan, maka apa yang diinginkan oleh perempuan akan dapat tertampung dalam keputusan/kebijakan tersebut. Jika perempuan berpartisipasi atau melakukan aktivitas-aktivitas tetapi tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan tentang aktivitas tersebut, maka kemungkinan besar aktivitas yang dilakukannya tidak akan mengatasi persoalan-persoalan yang benar-benar dirasakannya, atau tidak akan memperbaiki status jendernya. Jika perempuan selalu didikte oleh orang lain tentang apa yang harus dilakukannya, maka selamanya posisinya dalam hubungan dengan pria akan selalu merupakan subordinasi.

Dimensi kesetaraan akses berarti adalah bahwa perempuan dapat memperoleh "jalan masuk" terhadap berbagai aktivitas dan memiliki sumberdaya yang diperlukannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakannya dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sumberdaya bisa berarti sumberdaya fisik seperti tanah, alat-alat produksi termasuk benih-benih pertanian, kredit, dan lain-lain serta sumberdaya non fisik, seperti ketrampilan, pendidikan, kesehatan, pelayanan penyuluh dan ahli, dan sebagainya. Akses berarti juga apakah perempuan dapat menikmati hak atas apa yang dilakukan oleh anggota keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Jika perempuan banyak

berpartisipasi tetapi tidak dapat menikmati hasil kerjanya, maka akses perempuan terhadap hasil kerja tidak ada. Hal ini berarti kesetaraan jender dalam hal ini akses tidak berjalan sepenuhnya.

Kesetaraan jender dalam hal kontrol berarti perempuan dapat menentukan secara mandiri tentang apa yang akan dia lakukan atau tidak akan lakukan, menentukan secara mandiri untuk apa hasil kerjanya atau hasil kerja anggota keluarga yang diserahkan kepadanya akan dipergunakan. Jika perempuan tidak dapat memutuskan secara mandiri apakah dia akan bekerja atau tidak, untuk apakah hasil kerjanya akan dipergunakan, berarti perempuan tidak memiliki kontrol atas dirinya.

Kesetaraan jender berarti juga kesetaraan dalam menikmati hasil-hasil aktivitas, jika perempuan melakukan berbagai aktivitas tetapi tidak mendapat manfaat dari apa yang dilakukan, berarti perempuan belum memiliki kesetaraan dalam menikmati hasil atau mendapat manfaat dari apa yang dilakukannya.

Kesetaraan jender bukanlah tujuan, dia hanya merupakan sarana agar perempuan dapat berperan lebih baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Sama seperti laki-laki, perempuan tidak akan menampilkan kapasitas dirinya secara maksimal jika statusnya rendah, jika deskriminasi dilakukan terhadap dirinya, jika dia merasa rendah dibanding orang lain. Oleh karena itu kesetaraan jender bukanlah suatu kondisi dimana dalam semua hal perempuan sama dengan laki-laki, tapi suatu kondisi dimana perempuan dapat menentukan secara bebas apa yang akan dilakukannya dan apa yang tidak ingin dilakukannya. Dia tidak didikte orang lain. Jika perempuan ingin tetap tinggal di rumah dan tidak bekerja di luar rumah, dia berhak melakukan itu atas keinginan dan keputusannya sendiri. Tinggal di rumah dan tidak bekerja bukanlah ekspresi ketidaksetaraan jender asal dia diputuskan oleh perempuan itu sendiri dan bukan oleh orang lain, termasuk suaminya.

Untuk mencapai kondisi kesetaraan jender, banyak masalah yang menghambat. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

1. **Personal psikologis.** Di dalam dirinya perempuan sendiri sering memelihara ketakutan-ketakutan yang tidak perlu, sehingga secara psikologis dia tidak berani mengambil keputusan-keputusan secara mandiri. Seringkali perempuan berpikir bahwa jika dia terlalu aktif di luar rumah maka keluarga akan jadi korban, bahwa anak akan kurang mendapat perhatian, bahwa dia akan mendapat tantangan yang sangat kuat dari masyarakat dan sebagainya. Persoalan personal psikologis ini telah membuat perempuan "kalah sebelum bertanding". Oleh karena itu perempuan seringkali "secara sukarela" menyerahkan haknya untuk membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukannya sendiri kepada pihak lain, terutama suami.
2. **Sosial obyektif.** Keluarga (terutama suami, ayah, dan saudara laki-laki) seringkali tidak mendorong perempuan untuk membuat keputusan secara mandiri. Masyarakat juga berperan sebagai agen yang mensosialisasikan peran-peran jender baku yang kaku, sehingga perempuan takut menanggung resiko ditentang keluarga dan masyarakat untuk membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut dirinya sendiri.
3. **Ekonomi.** Hambatan ekonomi sering membuat perempuan tidak lagi sempat berpikir tentang posisi dan kondisi dirinya yang didiskriminasi. Dia terlalu sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan tidak sempat berpikir untuk hal lain.

Faktor-faktor ini secara simultan menjadi sinergi negatif yang tidak mendukung tercapainya aspek terpenting kesetaraan jender, yaitu kesetaraan dalam proses pembuatan keputusan penting menyangkut hidup dan kehidupan perempuan, alih-alih hidup dan kehidupan masyarakat dan negara.

## B. Pengertian Ketidakadilan Jender

Sejarah perbedaan jender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan jender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial budaya, melalui ajaran agama maupun peraturan negara. Melalui proses panjang, sosialisasi jender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan – seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan jender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Sebaliknya, melalui dialektika, konstruksi sosial jender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi jender, kaum laki-laki harus kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasikan serta termotivasi untuk menjadi atau menuju sifat jender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih besar dan lebih kuat. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya.

Perbedaan jender tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah yakni berbagai macam ketidakadilan, baik bagi laki-laki terlebih bagi kaum perempuan. Ketidakadilan jender merupakan sistem dan struktur, dimana kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan jender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yakni : marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan strategis), stereotype labelling (pembentukan label negatif), kekerasan (violence), beban kerja yang berat (*over burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran jender.

Komposisi penduduk di beberapa negara menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan potensi (modal) pembangunan yang besar. Namun demikian dalam kenyataannya modal tersebut belum dapat diberdayakan secara optimal. Perempuan justru sering mengalami ketidakadilan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan negara. Contoh-contoh ketidakadilan gender:

1. Dalam Keluarga

- Suami bekerja/berkarya, istri mengurus/merawat anak
- Pengambilan keputusan adalah laki-laki
- Lebih memilih anak laki-laki untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

2. Dalam Masyarakat

- Pembatasan dan pemilihan kesempatan kerja terhadap laki-laki dan perempuan

3. Dalam negara

- Undang-undang perburuhan, menjelaskan bahwa tunjangan keluarga melekat pada laki-laki sehingga upah perempuan lebih kecil daripada laki-laki.
- Undang-undang (KUHP) misalnya yang belum mampu melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
- Dsb.

### C. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai perwujudan ketidakadilan yang ada.

## 1. Marginalisasi (Proses Pemiskinan Ekonomi) Perempuan

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Sebagai contoh kebijakan pemerintah dalam hal produksi pangan yang terkenal dengan sebutan revolusi hijau, telah menyingkirkan perempuan dari kesempatan memperoleh upah memanen padi, oleh karena perubahan jenis varietas padi yang diperkenalkan tidak memungkinkan perempuan memungut padi dengan alat tradisional *ani-ani*. Kesempatan memperoleh pendapatan dari upah menumbuk padi bagi perempuan juga hilang ketika diperkenalkan teknologi *huller* (mesin penggilingan padi).

Proses pemiskinan perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, anak laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang lebih besar untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Anak laki-laki biasanya juga memperoleh makanan yang lebih banyak dan bermutu (lebih bergizi), memperoleh perhatian dan kasih sayang yang lebih besar dibanding anak perempuan. Proses pemiskinan juga diperkuat oleh tradisi dan tafsir agama, seperti misalnya dalam pembagian waris, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan.

## 2. Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena *lok* akhirnya akan pergi ke dapur juga. Bahkan, pemerintah



pernah memiliki aturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Namun jika sang istri akan belajar ke luar negeri maka dia harus memiliki ijin dari suami. Terdapat banyak hambatan bagi perempuan untuk tampil terlibat dalam ranah publik, diantaranya dia harus mendapatkan ijin dan sepengetahuan suami atau bahkan pihak keluarga besarnya.

### 3. Jender dan Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contoh stereotipe yang bersumber dari pandangan jender, misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika terjadi perkosaan, masyarakat cenderung untuk menyalahkan korban (*blame it to the victim*). Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

### 4. Jender dan Kekerasan

Salahsatu sumber berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan terletak pada anggapan jender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias jender ini disebut *gender – related violence*. Pada dasarnya, kekerasan jender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan jender, diantaranya:

- a. Perkosaan terhadap perempuan termasuk perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan pemaksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa

kerelaan yang bersangkutan. 'Ketidakrelasaan ini seringkali tidak terekspresikan disebabkan karena berbagai faktor, misalnya ketakutan; malu; keterpaksaan baik ekonomi, sosial, maupun kultural; atau mungkin karena tidak ada pilihan lain.

- b. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).
- c. Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*) misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Terdapat anggapan di masyarakat yang melatarbelakangi tindakan ini, diantaranya adalah alasan untuk mengontrol perilaku perempuan.
- d. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. Terdapat standar ganda baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah dalam soal prostitusi ini.
- e. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Kekerasan jenis ini bersifat non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
- f. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam KB (*enforced sterilization*).
- g. Kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini biasanya terjadi di tempat kerja atau tempat-tempat umum seperti dalam bis.
- h. Pelecehan seksual (*sexual and emotional harrassment*). Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.

## 5. Jender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumahtangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumahtangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumahtangganya. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Pekerjaan rumahtangga (domestik) dianggap sebagai pekerjaan kurang produktif dan tidak diperhitungkan dalam statistik negara.

## D. Faktor –faktor yang Menyebabkan Ketidakadilan Jender

### 1. Agama

Kebanyakan agama besar di dunia, mempunyai dalil-dalil tertentu tentang kehidupan seksual antara makhluk manusia, tentang pendefinisian identitas laki-laki dan perempuan serta seksualitas mereka, dan tentang kehidupan keluarga. Biasanya juga dirumuskan pula persoalan-persoalan warisan, perkawinan, perceraian dan hubungan-hubungan ekonomi antar sesama manusia. Antara satu agama dengan yang lainnya terdapat perbedaan dalam kadar kerincian dari dalil-dalil yang mengatur tingkah laku manusia. Ada yang memberi batasan-batasan umum, tetapi ada yang terwujud dalam aturan-aturan yang sangat terperinci.

Dalam filsafat agama Katholik, seksualitas merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan keduniawian dan secara potensial bisa menjadi sumber kesesatan. Seksualitas hanya boleh dikembangkan dalam lembaga perkawinan, terutama untuk tujuan reproduksi biologis. Dalam konteks ini, seksualitas dalam perkawinan menjadi sesuatu yang suci, yang diberkahi Tuhan. Karena itu perceraian pada dasarnya tidak diberkahi. Ijin untuk perceraian, apakah permintaannya datang dari pihak istri atau pihak suami, hanya bisa dikeluarkan oleh lembaga keagamaan tertinggi.

Poligami dalam Islam mengasumsikan bahwa laki-laki mempunyai dorongan seksual yang besar yang harus disalurkan untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan jasmani dan rohani yang bisa muncul. Seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan paling banyak empat perempuan, tetapi juga dianjurkan menjaga keseimbangan di antara mereka agar tidak timbul konflik-konflik sosial. Seorang perempuan hanya boleh kawin dengan satu laki-laki, dan kadang harus membaginya dengan perempuan lainnya yang juga menjadi istri suaminya.

Dalam agama Budha, perempuan dianggap sebagai sumber kemunculan nafsu biologis, dengan demikian menghambat terlepasnya seseorang dari dunia nyata, dan dari penderitaan dan kebodohan. Dasar dari kontradiksi ini muncul pada saat seksualitas perempuan (bukan laki-laki) dilihat sebagai sumber kesesatan, tetapi pada saat yang sama pula poligami dan pelacuran disahkan. Poligami disahkan karena pentingnya penguasaan atas tenaga kerja perempuan dan kontribusinya terhadap rumahtangga, selain untuk melayani kebutuhan seksual laki-laki. Sedangkan prostitusi disahkan karena secara praktis pelayanan seksual bisa dilakukan tanpa ikatan sosial. Secara ideologis, pelacur dianggap sebagai perwujudan ketidaksempurnaan karma (pencerminan perilaku dalam hidup yang lampau), atau ketidakmurnian karma yang berarti bukan merupakan sesuatu yang dikecam.

Nilai-nilai keagamaan Hindu didasarkan atas empat dalil: moksa, yang menekankan *renunciation*; dharma yang menekankan keberhasilan duniawi; karma yang berarti kepuasan sensual. Keempat dalil ini menjadi dasar dari berbagai stereotip tentang perempuan yang beraneka ragam dan bertentangan, seperti perawan suci, penggoda seksual, istri penurut, ibu yang dihormati, janda yang ditakuti, perempuan tidak suci, *partner* seks yang perkasa. Pada saat yang bersamaan perempuan dilihat sebagai sumber kehidupan (disimbolkan bentuk Dewi Sri untuk ritual-ritual pada saat panen). Satu hal yang amat jelas dalam Hinduisme, sebagaimana juga agama lainnya, ialah ambiguitas pandangan tentang posisi perempuan.

## 2. Pendidikan

Pendidikan yang diberikan di sekolah dasar sangat menunjukkan pembakuan peran-peran sosial perempuan dan laki-laki terutama terlihat dalam buku-buku teks yang dipelajari. Dalam analisisnya terhadap buku-buku pelajaran di sekolah dasar, Logsdon mengatakan bahwa ibu biasanya tinggal di rumah, bapak pergi ke kantor. Ibu tidak berbuat lain kecuali kerja rumahtangga, mengasuh anak, belanja, dan sembahyang. Ibu makan dan mandi setelah Bapak. Bapaklah yang mempunyai pekerjaan, membimbing anak, menghidupi dan melindungi keluarga. Menurutnya, hal ini agak janggal, mengingat bahwa perempuan di Indoneisa sangat terlibat dalam kegiatan ekonomi dan berbagai sektor, berbeda dengan kasta-kasta atau kelas-kelas tertentu di India misalnya.

Pendidikan yang memperhatikan kesetaraan jender di sekolah-sekolah masih jauh dari yang diidealkan. Para guru di sekolah kurang mempunyai pengalaman dalam menanamkan nilai-nilai baru dalam hubungan heteroseksual dalam pengasuhan anak. Mereka masih mempunyai pola berpikir bahwa laki-laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumahtangga. Oleh karena itu anak laki-laki akan diberikan pelajaran (ekstrakurikuler) berupa silat atau jenis bela diri lain dengan harapan agar memiliki rasa percaya diri yang kuat, dan hal ini dibutuhkan sebagai calon seorang pemimpin. Sementara itu anak perempuan diberikan pelajaran memasak, menjahit, menari dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar nanti kelak dapat menjadi ibu rumah tangga yang trampil melayani suami dan pandai menghibur suami. Semasa taman kanak-kanak, permainan untuk anak laki-laki adalah perang-perangan dengan menggunakan senjata (pistol-pistol), sementara anak perempuan bermain masak-masakan. Perbedaan ini dilakukan bukan menunjukkan perbedaan yang esensial, tetapi perbedaan yang berdasarkan kebiasaan belaka. Perempuan diposisikan sebagai makhluk lemah dan perlu dikasihani, sedangkan laki-laki identik dengan dunia yang kasar, keras, dan mengandalkan otot.

Pembedaan perlakuan antara murid laki-laki dan murid perempuan juga terjadi pada upacara-upacara yang digelar di sekolah. Anak laki-laki,

karena suaranya keras, selalu dipilih sebagai pemimpin upacara. Mereka tidak menyadari bahwa murid perempuan sebenarnya juga mampu bersuara keras (lantang), dan pantas menjadi pemimpin upacara. Perbedaan perlakuan tersebut tidak pernah diprotes oleh siswa perempuan oleh karena semua perlakuan tersebut mereka anggap wajar juga. Perlakuan tidak adil, dan hal itu lebih banyak merugikan siswa perempuan, ternyata juga dilakukan oleh guru perempuan. Jadi dengan demikian kaum perempuanpun sebenarnya juga ikut melestarikan dan memperkuat ketidakadilan jender. Hal ini terjadi karena konstruksi sosial budaya yang berlangsung lama sehingga hal itu juga mempengaruhi pola pikir perempuan. Secara sistematis kaum perempuan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban ketidakadilan yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu pemahaman kesetaraan jender, kesadaran, dan sensitivitas jender, oleh para penyelenggara pendidikan, para pengarang buku pelajaran, kiranya terus diasah demi terselenggaranya pendidikan yang adil jender.

### **3. Film**

Krishna Sen, seorang ahli ilmu politik India, mengatakan bahwa sama halnya dengan media massa lainnya, perfilman atau film merupakan salahsatu arena dimana ideologi dominan memainkan peranan penting. Peranan negara atau kepentingan modal secara bersama-sama melalui badan sensor atau aparat lain mengarahkan isi cerita dan skenario sesuai dengan kepentingan mereka, yaitu untuk kepentingan komersial atau menjaga "stabilitas nasional". Bagaimana penggambaran perempuan dalam dunia perfilman? Sen mengatakan bahwa pembicaraan tentang peran laki-laki dan perempuan dalam perfilman Indonesia, umumnya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam dua kutub, yaitu perempuan sebagai ibu atau sebagai objek seksual yang di satu pihak dilihat sebagai penggoda dan pengganggu ketentraman rumahtangga orang lain.

Karena tipe idealnya ialah ibu rumahtangga yang sadar akan tanggungjawabnya dan mempunyai naluri untuk mencintai anak-anaknya, penyimpangan dari tipe ini merupakan kesalahan yang perlu di"lurus"kan.

Perempuan yang tidak menikah dan yang mempunyai karier dianggap selalu menjadi problema yang sumbernya dilihat berasal dari perempuan itu sendiri, bukan dari prasangka masyarakat.

#### **4. Kesusastraan**

Tineke Hellwig, ahli sastra Indonesia dari Belanda, menyoroti dua karya sastra sehubungan dengan bagaimana masalah perkosaan dan perempuan dibahas dan dicitrakan. Menurut Hellwig, sebagaimana jenis kelamin dari penulis tak banyak membedakan bagaimana masalah perkosaan dan figur perempuan ditampilkan dalam teks. Keduanya menganggap:

- a. Bahwa keperawanan perempuan merupakan hal yang paling utama (lebih utama dari terjadinya perkosaan itu sendiri) dan apabila keperawanan ini hilang, satu-satunya jalan keluar ialah perkawinan (walaupun ini berarti kawin dengan orang yang memperkosa perempuan tersebut).
- b. Bahwa peran sebagai ibu merupakan situasi yang paling ideal yang menyelesaikan segala permasalahan lainnya. Hellwig menegaskan bahwa masalah perkosaan sebagai suatu tindak kekerasan yang menjabarkan hubungan asimetris laki-laki dan perempuan sama sekali tidak didiskusikan. Perkosaan itu sendiri hanya merupakan batu loncatan untuk menggambarkan alur cerita selanjutnya yang lebih berfokus pada hubungan ibu dan anak yang merupakan akibat peristiwa perkosaan tersebut.

#### **5. Keluarga**

Sehubungan dengan diskusi tentang ideologi, ada dua aspek tentang keluarga yang perlu diutarakan. Pertama, keluarga perlu dilihat sebagai wadah sosialisasi nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Kedua, konsep keluarga juga perlu dilihat sebagai bagian dari nilai itu sendiri. Dalam kasus pertama, keluarga apakah berbentuk keluarga inti maupun keluarga luas memegang peranan penting dalam penanaman nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai ini bisa menyangkut pilihan

moral yang berkaitan dengan apa yang dianggap baik dan buruk maupun menyangkut kognisi yang berkaitan dengan bagaimana cara menginterpretasikan dunia. Dalam literatur seringkali dikatakan bahwa keluarga merupakan wadah sosialisasi nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Bahkan dikatakan pula bahwa nilai-nilai dominan sebagaimana yang dipromosikan oleh negara dilestarikan dalam pranata keluarga. Namun demikian pandangan ini merupakan generalisasi yang mengabaikan kemungkinan terjadinya berbagai arus berlawanan di dalam keluarga itu sendiri, terutama apabila latar belakang ekonomi, kesukuan, atau agama diikutsertakan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam penginternalisasian nilai-nilai tertentu.

## 6. Negara

Negara juga mempunyai kontribusi terhadap lestarnya ketidakadilan gender di masyarakat. Kebijakan publik baik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam program pembangunan yang tidak memperhatikan aspek gender (*gender blind*) memiliki dampak terhadap ketidakadilan gender. Kebijakan publik yang tidak memperhatikan aspek hubungan gender berpotensi menempatkan perempuan pada posisi subordinat laki-laki, dan hal ini pada gilirannya akan menyebabkan hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat asimetris (tidak seimbang). Sebagai contoh kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB, mengakibatkan posisi perempuan semata-mata sebagai objek penderita yang sepenuhnya memikul tanggungjawab masalah reproduksi dan fertilitas. Perempuan tidak mempunyai hak (ruang) untuk mengatur sendiri kehidupan seksualitas atau memutuskan secara mandiri berapa jumlah anak yang akan dilahirkan. Contoh lain, hingga saat ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan (dalam segala tingkat) yang mencerminkan ketidakadilan gender seperti misalnya sanksi hukuman yang terlalu rendah bagi kasus perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP.



## **E. Strategi Mengurangi Ketidakadilan Jender**

Memperjuangkan keadilan jender merupakan tugas berat, karena masalah jender adalah masalah yang sangat intens, di mana kita masing-masing terlibat secara emosional. Banyak terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan jender diaktifkan, karena menggugat masalah jender sesungguhnya juga berarti menggugat privilege (hak istimewa) yang kita dapatkan dari ketidakadilan jender. Persoalannya, spektrum ketidakadilan jender sangat luas, mulai yang ada di kepala dan di dalam keyakinan kita masing-masing sampai urusan negara. Dengan demikian bila kita memikirkan jalan keluar, pemecahan masalah jender perlu dilakukan secara serempak. Pertama-tama perlu upaya-upaya bersifat jangka pendek yang dapat memecahkan masalah-masalah praktis ketidakadilan tersebut. Sedangkan langkah berikutnya adalah usaha jangka panjang untuk memikirkan bagaimana menemukan cara strategis dalam rangka memerangi ketidak-adilan jender.

### **1. Strategi Jangka Pendek**

Dari segi pemecahan praktis jangka pendek, dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. Misalnya dalam hal mengatasi masalah marginalisasi perempuan di pelbagai projek peningkatan pendapatan kaum perempuan, perlu melibatkan kaum perempuan dalam program pengembangan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan terlibat dan menjalankan kekuasaan di sektor publik. Akan halnya yang menyangkut subordinasi perempuan, perlu diupayakan pelaksanaan pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok perempuan untuk jangka pendek.

Pendidikan yang memperhatikan kesetaraan jender di sekolah-sekolah masih jauh dari yang diidealkan. Para guru kurang mempunyai pengalaman untuk menanamkan nilai-nilai baru dalam hubungan heteroseksual dalam pengasuhan anak di sekolah. Para guru masih mempunyai anggapan dan pola pikir bahwa laki-laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga.

Anak laki-laki diberikan pelajaran bela diri supaya mempunyai kepercayaan diri yang lebih besar karena dia akan menjadi kepala keluarga dan pemimpin masyarakat. Sementara anak perempuan diberi materi pelajaran seperti memasak atau menari sehingga kelak mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik dan seterusnya. Perbedaan perlakuan antara murid-murid perempuan dan laki-laki juga terjadi pada upacara-upacara yang diadakan di sekolah. Anak laki-laki, oleh karena suaranya lantang selalu dipilih sebagai pemimpin upacara. Mereka tidak menyadari bahwa murid perempuan juga mampu bersuara lantang dan mampu menjadi pemimpin upacara.

Buku-buku pelajaran pun masih menunjukkan adanya ketimpangan gender. Dalam buku pelajaran sekolah dasar, terutama pelajaran Bahasa Indonesia, peran perempuan dan laki-laki dibedakan menurut peran domestik, publik dan sosial. Kegiatan memasak selalu untuk perempuan, sedangkan berkebun, mengurus kendaraan, membaca koran, kepemilikan tanah, atau kepemilikan barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi selalu untuk laki-laki. Profesi seperti polisi, dokter, atau militer masih dilekatkan pada laki-laki, sementara juru masak, penari, penyanyi, identik dengan perempuan. Padahal sesungguhnya telah terjadi banyak perubahan. Semasa taman kanak-kanak, permainan untuk anak laki-laki adalah perang-perangan, sementara anak perempuan main masak-masakan. Sejak dini, perempuan dan laki-laki dibedakan bentuk permainan. Perbedaan yang dilakukan bukan menunjukkan perbedaan yang esensial, tetapi perbedaan berdasarkan kebiasaan belaka. Perempuan diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan perlu dikasihani, sedangkan laki-laki identik dengan dunia yang kasar, keras, dan mengandalkan ototnya.

Pemahaman kesetaraan gender, kesadaran, dan sensitivitas gender oleh para penyelenggara pendidikan, para pengarang buku pelajaran, serta para guru, kiranya terus menerus diasah demi perubahan paradigma dan persepsi yang lebih adil gender. Dengan memperbarui paradigma guru lewat pelatihan yang mendalami gender, guru akan dapat memperlakukan siswa secara adil gender. Dan tidak ada diskriminasi yang merugikan bagi siswa perempuan ataupun laki-laki.

Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan dan pelbagai stereotipe terhadap kaum perempuan, suatu aksi jangka pendek juga perlu mulai digalakkan. Kaum perempuan sendiri harus mulai memberikan pesan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindak kekerasan dan pelecehan itu terhenti. Membiarkan dan menganggap biasa terhadap kekerasan dan pelecehan berarti mengajarkan dan bahkan mendorong para pelaku untuk melanggengkannya. Pelaku penyiksaan, pemerkosaan dan pelecehan seringkali salah kaprah bahwa ketidaktegasan penolakan dianggapnya karena diam-diam perempuan juga menyukainya. Perlu kiranya dikembangkan kelompok perempuan yang memungkinkan mereka saling membahas dan saling membagi rasa pengalaman untuk berperan menghadapi masalah kekerasan dan pelecehan. Karena kekerasan, pemerkosaan, pelecehan dan segala bentuk yang merendahkan kaum perempuan bukan semata-mata salah kaum perempuan, maka usaha untuk mengehentikan secara bersama perlu digalakkan.

Termasuk ke dalam kegiatan praktis jangka pendek adalah mempelajari perlbagai teknik oleh kaum perempuan sendiri guna menghentikan kekerasan, pemerkosaan dan pelecehan. Misalnya mulai membiasakan diri mencatat setiap kejadian dalam buku harian, termasuk sikap penolakan dan responsi yang diterima, secara jelas kapan dan di mana. Catatan ini kelak akan berguna jika peristiwa tersebut ingin diproses secara hukum. Usaha seperti menyuarakan *uneg-uneg* ke kolom "surat pembaca" perlu diintensifkan. Usaha ini tidak saja memiliki dimensi praktis jangka pendek tetapi juga sebagai upaya pendidikan dengan cara kampanye anti kekerasan dan anti pelecehan terhadap kaum perempuan bagi masyarakat luas. Secara praktis dalam surat-surat itu harus tercatat semacam ancaman, yakni jika pelecehan dan kekerasan tidak segera dihentikan, maka kejahatan semacam itu bisa dan akan dilaporkan ke penguasa pada tingkatan yang lebih atas. Kesankan bahwa anda tidak sendiri melainkan suatu kelompok perempuan yang tengah menyadari hal itu. Suatu kelompok atau organisasi lebih sulit diintimidasi ketimbang individu.

## 2. Strategi Jangka Panjang

Usaha perjuangan strategis jangka panjang perlu dilakukan untuk memperkuat usaha praktis tersebut. Mengingat usaha-usaha praktis di atas sering kali justru berhenti dan tidak berdaya hasil karena hambatan ideologis, misalnya bias jender, sehingga sistem masyarakat justru akan menyalahkan korbannya, maka perjuangan strategis ini meliputi pelbagai peperangan ideologis di masyarakat. Bentuk-bentuk peperangan tersebut misalnya dengan melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan pelbagai bentuk ketidakadilan jender. Upaya strategis itu perlu dilakukan dengan berbagai langkah pendukung, seperti melakukan studi tentang pelbagai bentuk ketidakadilan jender dan manifestasinya baik di masyarakat, negara maupun dalam rumahtangga. Bahkan kajian ini selanjutnya dapat dipakai untuk melakukan advokasi guna mencapai perubahan kebijakan, hukum dan aturan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap kaum perempuan.

Dalam beberapa dekade belakangan ini, banyak kemajuan yang telah dicapai perempuan dalam berbagai aspek. Kemajuan itu lebih menunjuk kepada kemajuan dalam kondisi perempuan namun belum pada posisi perempuan. Dalam bidang pendidikan misalnya, jumlah kaum perempuan yang buta huruf telah menurun drastis dan persentasenya kini tidak berbeda jauh dengan laki-laki. Angka Partisipasi Sekolah (APS) terutama untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah juga menunjukkan angka yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Berbagai indikator kesehatan juga menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Selain itu kesempatan kerja kaum perempuan juga menunjukkan peningkatan yang drastis. Jika dulu hanya kaum laki-laki yang mendominasi lapangan kerja karena dianggap produktif, namun saat ini jam kerja kaum perempuan dan laki-laki secara global tidak menunjukkan perbedaan yang berarti.

Persoalannya kemudian apakah perubahan tersebut yakni perubahan yang hanya menyentuh dan menyangkut persoalan-persoalan praktis kaum perempuan (*women condition*) cukup untuk merubah posisi kaum perempuan (*women position*). Dalam aspek yang lebih strategis, jangka

panjang, sesungguhnya perjuangan emansipasi kaum perempuan barulah dimulai. Masih diperlukan upaya yang lebih strategis yang menyangkut perubahan asumsi, konsepsi, keyakinan dan persepsi masyarakat tentang kaum perempuan. Usaha menggeser asumsi ini pada dasarnya merupakan usaha dan perjuangan jangka panjang karena menyangkut perjuangan dalam aspek ideologi. Untuk menuju gerakan yang lebih strategis, feminisme membutuhkan berbagai rumusan dan memahami tantangan-tantangannya.

Pada masa mendatang terdapat dua strategi yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketidakadilan gender. Pertama, mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan, dan kedua, strategi advokasi. Untuk yang pertama, diperlukan suatu tindakan yang diarahkan menuju terciptanya kebijakan manajemen dan keorganisasian yang memiliki perspektif gender. Ini berarti bahwa upaya-upaya penanganan masalah struktural dan sistemik seiring dengan perkembangan kelembagaan setiap organisasi maupun institusi pendidikan. Suatu kebijakan yang tegas mulai harus diperkenalkan, misalnya kebijakan *gender staff recruitment* dan *staff development*, perencanaan program yang berwawasan gender, pengembangan kurikulum dan metode pendidikan, dalam setiap kegiatan evaluasi, dalam kegiatan penelitian dengan mengenalkan *feminist research*, manajemen yang berperspektif gender dan seterusnya.

Sedangkan untuk strategi kedua yakni advokasi, diperlukan suatu pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender di negara dan masyarakat. Untuk mempersiapkan perjuangan melalui perubahan hukum dan pelaksanaannya ini perlu dilakukan identifikasi permasalahannya, pertama, apakah letak masalahnya berada dalam substansi hukum (*substance of the law*) yang memuat ketidakadilan gender. Yang dimaksud "substansi hukum" di sini adalah baik hukum yang tertulis seperti undang-undang negara maupun tafsiran agama dalam bentuk fikih, ataupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat. Apabila persoalannya di sana, strateginya adalah melakukan advokasi untuk mendesak alternatif hukum yang berperspektif keadilan gender. Kedua jika persoalannya terletak pada kultur hukum artinya kultur

masyarakat dalam mentaati hukum, maka strategi yang dianggap paling strategis adalah kampanye dan pendidikan massa. Terakhir jika persoalannya terletak pada aparat pelaksana hukum atau struktur hukum maka strategi yang tepat adalah kampanye pendidikan dan penyadaran aparat hukum tentang masalah ketidakadilan jender.

## **BAB 3**

# **PROGRAM PEMBANGUNAN RESPONSIF JENDER**

### **A. Pengertian**

Secara umum program pembangunan responsif jender dapat diartikan sebagai pembangunan yang memperhatikan kepentingan baik laki-laki maupun perempuan secara keseluruhan. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pembangunan responsif jender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segenap aspek kehidupan. Dengan demikian program pembangunan responsif jender lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan strategis laki-laki dan perempuan dan bukan kebutuhan praktis laki-laki dan perempuan. Dalam prakteknya, seringkali program pembangunan yang dijalankan memiliki dampak yang berbeda bagi kehidupan laki-laki dan perempuan. Kepentingan laki-laki seringkali lebih diperhatikan daripada kepentingan perempuan. Timbulnya dampak yang berbeda ini antara lain bersumber pada kesalahan dalam perencanaan pembangunan. Pada tahap perencanaan ini, para perencana tidak secara cermat memperhatikan data yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan (seperti misalnya data mengenai tingkat pendidikan, tingkat putus sekolah, kondisi kesehatan dan sebagainya).

**Contoh:**

Program pemberian beasiswa yang diberikan kepada anak sekolah ternyata lebih banyak diberikan kepada murid laki-laki, padahal dalam kenyataannya lebih banyak perempuan yang mengalami putus sekolah atau paling tidak lebih rentan untuk mengalami putus sekolah. Pemberian beasiswa tersebut justru berdampak berupa meningkatnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angka putus sekolah.

## **B. Apa yang Diperlukan ?**

Untuk menyusun program pembangunan yang responsif gender diperlukan beberapa hal (syarat) antara lain:

### **1. Data terpilah gender**

Fungsi data terpilah gender dalam perencanaan pembangunan adalah memberikan gambaran permasalahan kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat. Seringkali data terpilah gender juga disebut sebagai data "pembuka wawasan". Data ini akan lebih baik jika berupa data kuantitatif dan juga data kualitatif. Apabila suatu instansi memiliki data terpilah gender dalam lingkup wilayah kerjanya, maka data tersebut menjadi dasar kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang mengarah kepada pengurangan atau bahkan penghapusan kesenjangan gender yang terjadi.

Data terpilah gender ini selanjutnya perlu pula dilengkapi dengan sistem pendataan yang kontinyu. Gunanya adalah untuk mengetahui apakah dengan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu memiliki dampak yang signifikan (nyata) berupa pengurangan/penghapusan kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat. Untuk membangun sistem pendataan ini diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh



aparat yang berada di jajaran suatu instansi. Selain itu instrumen pengumpulan data yang dipersiapkan juga harus responsif gender, artinya mampu mengakomodasi perbedaan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

## **2. Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan**

Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses pembangunan pada dasarnya berbeda. Kebutuhan yang berbeda tersebut bermula dari kesenjangan gender yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan juga mestinya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Idealnya proses pembangunan harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tersebut agar kesenjangan gender dapat dikurangi atau bahkan jika mungkin dihilangkan. Dengan demikian program pembangunan yang responsif gender selalu berorientasi kepada kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan yang berkaitan dengan aspek gender ini dapat dibagi menjadi dua yakni kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu pendek (dekat) untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan harkat dan martabat. Namun demikian pemenuhan kebutuhan praktis ini masih agak sulit diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan gender. Dalam beberapa hal pemenuhan kebutuhan praktis justru menyebabkan ketimpangan gender makin kuat. Sementara itu kebutuhan strategis adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan dalam jangka waktu panjang hal itu akan berdampak pada peningkatan kesetaraan gender. Contoh kebutuhan praktis adalah: air bersih, ketrampilan memasak, peralatan dapur dan sebagainya. Contoh kebutuhan strategis adalah: kurikulum pendidikan sekolah yang responsif gender, pola pengambilan keputusan adil gender, pola partisipasi dalam dunia politik yang adil gender dan sebagainya. Contoh-contoh terakhir ini merupakan kebutuhan strategis karena dalam kenyataannya sekarang ini

kurikulum yang diterapkan sekolah masih bias jender. Pola pengambilan keputusan dalam rumahtangga selama ini lebih banyak didominasi oleh laki-laki (suami). Sementara itu peran perempuan dalam dunia politik masih sangat rendah. Dengan demikian semakin banyak perempuan yang berperan dalam dunia politik maka akan semakin terjadi kesetaraan jender dalam dunia politik.

Untuk memenuhi kebutuhan strategis ini diperlukan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terus menerus. Hal ini mengingat kesenjangan jender untuk sebagian bersumber pada budaya yang berkembang di masyarakat. Selain itu struktur (sistem) yang ada masih menghambat akses perempuan ke dunia politik. Dalam kenyataannya merubah budaya masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Sebagai contoh, untuk meningkatkan peran perempuan dalam dunia politik, tidak cukup hanya melalui pelatihan ketrampilan teknis berpolitik praktis kepada perempuan, melainkan juga harus diikuti dengan misalnya sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar terjadi kesadaran jender terutama pada kaum laki-laki. Tujuannya agar sistem nilai budaya yang menghambat akses perempuan dalam dunia politik dapat berkurang. Upaya lain yang bersifat sistematis (bersifat struktural) juga perlu dilakukan misalnya upaya untuk menjamin bahwa ketentuan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen dapat benar-benar terwujud. Reformulasi berbagai kebijakan (peraturan) yang bersifat diskriminatif (kebanyakan merugikan perempuan) juga perlu dilakukan secara simultan. Jadi untuk mengurangi kesenjangan jender dalam satu aspek saja diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak yang disertai dengan komitmen yang kuat.

### **3. Memuat masalah kesenjangan jender dan cara untuk mengatasinya**

Masalah kesenjangan jender dapat diidentifikasi apabila tersedia data terpilah jender. Data terpilah jender dapat menunjukkan kepada kita masalah kesenjangan jender. Misalnya dari statistik yang dikeluarkan BKKBN, menyebutkan bahwa angka partisipasi KB (pengguna alat kontrasepsi) perempuan sebesar 98% sedangkan laki-laki hanya 2%.

Hal ini berarti ada kesenjangan peran dalam Keluarga Berencana. Namun demikian dalam kasus-kasus tertentu masalah kesenjangan gender dapat diidentifikasi meskipun tidak (belum) tersedia data terpilah gender yang dikumpulkan melalui kegiatan survai atau penelitian. Sebagai contoh, berdasarkan pengamatan (observasi) sehari-hari, peran laki-laki dalam kegiatan PKK dan Posyandu sangat rendah, dan hal ini nampak berlaku umum (terjadi dimana-mana). Oleh karena itu kita dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan gender yakni berupa peran (partisipasi) dalam kegiatan PKK dan posyandu didominasi oleh perempuan. Kita dapat menyimpulkan demikian, meskipun belum ada data (statistik) resmi dari instansi pemerintah.

Masalah kesenjangan gender tersebut selanjutnya dianalisis lebih jauh yakni dengan mendeskripsikan apakah ada kesenjangan lain dalam dimensi akses, kontrol dan manfaat (lihat bab 7: *Aplikasi Gender Analysis Pathway*). Jika telah diketahui berbagai aspek kesenjangan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya kesenjangan tersebut baik faktor sosial budaya, agama, ekonomi maupun faktor lain yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam hal akses, peran, kontrol dan manfaat. Sebagai contoh, dalam kasus KB tersebut diatas, dari segi akses perempuan memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pelayanan kontrasepsi, oleh karena alat yang tersedia memang lebih banyak diperuntukkan perempuan. Dari segi kontrol, perempuan memiliki kontrol yang rendah, oleh karena keputusan dalam hal tersebut (ikut/tidak ikut KB) lebih banyak dipegang (didominasi) oleh laki-laki. Sedangkan dari segi manfaatnya, lebih banyak dinikmati oleh laki-laki, oleh karena laki-laki tidak perlu menderita akibat pemasangan (pemakaian) alat kontrasepsi, termasuk secara langsung harus menanggung efek sampingnya (jika ada). Adapun faktor-faktor penyebab hal itu semua antara lain adalah sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat bahwa "KB (dan masalah kesehatan reproduksi lain) adalah urusan perempuan", "laki-laki tidak pantas ikut KB", "kejantanan/keperkasaan laki-laki akan berkurang jika ikut KB" dan sebagainya.

Apabila keseluruhan analisis tersebut dilakukan maka langkah selanjutnya adalah memikirkan upaya (strategi) untuk mengatasi kesenjangan jender tersebut. Upaya-upaya yang akan kita lakukan tersebut hendaknya secara langsung mengarah kepada akar permasalahan. Jika diketahui bahwa kesenjangan dalam KB bersumber pada masalah budaya (sistem nilai), maka yang harus dilakukan adalah pengikisan terhadap sistem nilai (pandangan-pandangan) masyarakat yang kurang mendukung program KB. Dalam hal ini peran tokoh masyarakat dan tokoh agama merupakan salah satu kunci pemecahan masalah. Hal ini mengingat struktur masyarakat kita terutama pada masyarakat perdesaan masih sangat diwarnai patrimonialisme. Dalam struktur masyarakat demikian, setiap perkataan dan tindakan pemimpin akan ditaati oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu upaya lain juga bisa dilakukan misalnya dengan memberikan kemudahan-kemudahan/fasilitas dan kualitas pelayanan KB yang lebih baik khususnya bagi kaum laki-laki. Jika mungkin perlu pula diberikan insentif/stimulus bagi laki-laki yang ikut program KB.

#### 4. Mempertimbangkan akibat hasil program bagi laki-laki dan perempuan

Program pembangunan yang responsif jender adalah program pembangunan yang memungkinkan perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama untuk memperoleh sumberdaya, termasuk kesempatan dan penghargaan. Hal ini berarti perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi apa yang dianggap penting dalam membentuk pilihan-pilihan dalam lingkungan masyarakat. Selain itu juga program pembangunan responsif jender berarti bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari kegiatan pembangunan.

Dalam kenyataannya, kebijakan/program pembangunan dari pemerintah jarang yang netral jender, dan kadang secara tidak sengaja berdampak negatif bagi perempuan. Banyak studi telah dilakukan guna membahas bagaimana program pembangunan telah memiskinkan kaum perempuan. Misalnya saja program revolusi hijau

(*green revolution*) telah menyingkirkan secara ekonomis (memiskinkan) kaum perempuan dari pekerjaan mereka (Fakih, 1998). Pada mulanya program itu dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (netral jender), namun dalam kenyataannya terdapat sekelompok penduduk (dalam hal ini perempuan) yang kemudian mengalami marginalisasi. Kenyataan tersebut membuka kesadaran kita bahwa memperkirakan dampak program pembangunan (baik untuk laki-laki maupun perempuan) harus dilakukan secara cermat sebelum kebijakan/program tersebut dijalankan.

Untuk dapat memperkirakan dampak pembangunan yang adil jender, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:

#### a. Data terpilah jender

Seringkali rencana program pembangunan yang dijalankan tidak didasarkan pada data terpilah jender, bahkan tidak jarang pula banyak program yang tidak didasarkan data sama sekali. Akibatnya sudah dapat diduga, dampak program pembangunan akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Alih-alih dapat mengatasi kesenjangan jender, program tersebut justru dapat memperlebar kesenjangan jender. Contoh kasus pada awal bab ini barangkali dapat menjadi bahan renungan kembali. Dengan diketahui data terpilah jender, maka arah program/kebijakan dapat lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang masih tertinggal. Kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif (*affirmative actions*) dapat dibuat untuk membantu kelompok masyarakat yang tertinggal dalam upaya mengejar ketertinggalannya. Sebagai contoh, pemberlakuan kuota keterwakilan 30% perempuan di parlemen, merupakan kebijakan afirmatif yang didasarkan data yang membuktikan bahwa peran perempuan dalam lembaga legislatif (parlemen) masih sangat rendah dan tidak sesuai dengan proporsi jumlah perempuan itu sendiri.

## b. Analisis jender yang akurat

Analisis jender yang akurat meliputi identifikasi dimensi kesenjangan (akses, peran, kontrol dan manfaat) serta faktor-faktor penyebabnya. Perencana pembangunan idealnya harus memiliki ketajaman dan sensitivitas yang tinggi ketika menganalisis komponen-komponen tersebut. Seringkali terjadi kekeliruan dalam identifikasi dimensi kesenjangan terutama pada akses, kontrol, dan manfaat. Pada aspek akses, seringkali yang dipertimbangkan hanya ada tidaknya peraturan (kebijakan) yang menghambat akses (dimensi struktural). Padahal dalam kenyataannya akses perempuan juga dihambat oleh budaya berupa tata nilai (dimensi kultural). Contohnya, akses perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkoperasi dinilai sama oleh karena tidak ada satu peraturanpun (baik itu undang-undang maupun perda) yang melarang/menghambat perempuan dan laki-laki masuk menjadi anggota dan pengurus koperasi. Kekeliruan di sini terletak pada belum diperhitungkannya hambatan budaya berupa tata nilai yang masih menganggap bahwa "masuk menjadi anggota koperasi adalah urusan laki-laki" (urusan publik), dan sebagainya.

Pada aspek (dimensi) kontrol, kekeliruannya seringkali terletak pada penilaian bahwa jika pada aspek peran dominan maka aspek kontrolnya pun juga dominan, padahal dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Contohnya peran perempuan dalam ber-KB sangat dominan, akan tetapi dari aspek kontrol sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pada umumnya keputusan-keputusan yang menyangkut hal itu dan kesehatan reproduksi pada umumnya masih didominasi oleh laki-laki. Sementara itu pada dimensi manfaat, kekeliruannya ada pada penilaian manfaat "yang seharusnya" (*das sollen*) bukan manfaat "yang senyatanya" (*das sein*). Dengan mengambil contoh yang sama (kasus KB), manfaat ber-KE dipandang sama antara laki-laki dan perempuan, karena dianggap jika keluarga tersebut memiliki anak sedikit maka seluruh keluarga (terutama suami dan istri) akan memperoleh manfaat yang sama. Dalam kenyataannya, tidak demikian oleh karena pada dasarnya laki-laki tidak perlu menderita akibat pemasangan/pemakaian alat

kontrasepsi dan juga menanggung efek samping yang ditimbulkannya.

### **Proses penyusunan perencanaan yang responsif jender**

Proses perencanaan pembangunan yang terjadi saat ini pada umumnya masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan masih berperan sangat minimal pada keseluruhan tingkatan proses perencanaan. Hal ini akan merakibat program pembangunan tersebut bersifat bias jender, apalagi jika laki-laki yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut tidak sensitif jender (*gender blind*). Pada akhirnya program pembangunan seperti ini merakibat semakin melebarnya kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Pada proses penyusunan program pembangunan yang hierarkhis (mulai dari tingkat dusun/desa pada musbangdes hingga rakorbang pada tingkat kabupaten/kota), keterlibatan perempuan hendaknya selalu ada dalam setiap tingkatan hirarkhis. Hal ini penting, mengingat keterlibatan aktif perempuan akan memberikan warna tersendiri bagi program pembangunan tersebut. Kepentingan dan kebutuhan perempuan yang lebih "orisinil" akan banyak diperoleh secara langsung dari kaum perempuan. Akomodasi terhadap kepentingan dan kebutuhan tersebut akan lebih memberikan jaminan bahwa manfaat pembangunan yang adil jender, dengan demikian program pembangunan yang disusun pun akan lebih bersifat responsif jender. Salahsatu upaya sistematis yang dapat menjamin laki-laki dan perempuan dapat berperan setara dalam proses pembangunan adalah melalui aturan hukum (dalam bentuk perda misalnya). Aturan tersebut secara teknis mengatur misalnya bahwa perencanaan program pembangunan harus disusun dengan mengikutkan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

### **Sistem informasi pembangunan responsif jender**

Sistem informasi ini memungkinkan perempuan dan laki-laki dapat berperan setara dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan serta pada tahap monitoring



dan evaluasi. Kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber-sumber informasi tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Kelompok perempuan merupakan segmen masyarakat yang relatif lebih tertinggal dalam hal akses terhadap sumber-sumber informasi terutama informasi mengenai pembangunan yang terjadi di masyarakat sekitar. Jikapun perempuan mengetahui pembangunan yang terjadi di masyarakat sekitar, tidak secara otomatis mereka dapat berperan aktif dalam keseluruhan proses tersebut. Hal ini mengingat masih terdapat pandangan di masyarakat bahwa perempuan tidak pantas ikut terlibat dalam urusan-urusan tersebut. Urusan tersebut merupakan wilayah laki-laki (urusan publik) dan sebagainya. Oleh karena itu pemberian perhatian yang lebih kepada perempuan dalam hal akses informasi perlu pula disertai sebuah mekanisme yang memungkinkan perempuan dapat berperan aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.

Salahsatu upaya yang dapat dilakukan menyebarkan informasi mengenai pembangunan adalah penyebaran informasi ke kelompok-kelompok atau organisasi "tipikal" yang biasanya diikuti oleh banyak perempuan misalnya kelompok pengajian, arisan dan sebagainya. Upaya lain yang lebih sistematis dalam membangun sistem informasi pembangunan responsif jender meliputi:

- a. pemilihan jenis media yang akan digunakan untuk menginformasikan program/proyek pembangunan (TV, Radio, Pamflet, brosur, leaflet, dan sebagainya). Prinsipnya adalah media tersebut merupakan media yang paling mudah diakses baik oleh laki-laki maupun perempuan.
- b. Pengemasan isu (pesan) yang akan disampaikan melalui media terpilih. Prinsipnya pesan tersebut mudah diterima oleh khalayak (komunikan).
- c. Pemilihan komunikator yang menyampaikan pesan harus benar-benar orang yang memiliki otoritas dan legitimasi di masyarakat sekitar.



## 7. Indikator yang digunakan adalah indikator responsif jender

Indikator responsif jender adalah indikator yang dapat menunjukkan atau menggambarkan tingkat kesetaraan jender antara laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu. Indikator responsif jender dalam kerangka perencanaan pembangunan yang responsif jender adalah sebagai alat untuk mengukur kemajuan atau perubahan dalam hal kesetaraan jender, setelah dalam kurun waktu tertentu, suatu kebijakan/program pembangunan dilaksanakan. Sebagai contoh angka partisipasi sekolah anak usia 6 –12 tahun untuk laki-laki sebesar 95%, sedangkan untuk anak perempuan 80% pada tahun 2000. Setelah sejumlah kebijakan dan program penyetaraan jender dalam hal angka partisipasi sekolah tersebut dijalankan selama 5 tahun, maka pada tahun 2005 dapat dilihat perkembangannya, apakah telah terjadi tingkat/derajat kesenjangan jender atau tidak.

Terdapat sejumlah indikator yang dapat dipakai oleh perencana pembangunan untuk melihat perkembangan kesetaraan jender di wilayah kerjanya. Dalam kondisi seperti ini seorang perencana dituntut untuk dapat memilih indikator yang paling tepat dan berkualitas baik. Berikut ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih indikator:

- a. Indikator harus dapat dibandingkan secara internasional. Indikator harus menggunakan definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baku dan mengikuti pedoman yang disediakan PBB dan institusi sektoral seperti *UNESCO*, *WHO* dan *ILO*. Beberapa indikator yang dimasud misalnya angka partisipasi sekolah, angka kematian bayi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan sebagainya.
- b. Indikator harus mengikutsertakan referensi kelompok pembandingan. Untuk membandingkan perempuan dan laki-laki dapat digunakan rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Meski demikian, tidak hanya laki-laki dari daerah/negara yang sama yang dapat digunakan sebagai kelompok pembandingan, akan tetapi dapat pula digunakan perempuan dari daerah/negara lain. Penggunaan perempuan dari daerah/negara lain sebagai pembandingan dapat dilakukan bila analisis yang disusun pada status perempuan dan bukan jender. Rasio jenis kelamin adalah alat diagnosa yang sangat kuat. Namun, di sebagian besar publikasi

statistik nasional dan internasional norma yang dipakai adalah data yang dipisah secara jenis kelamin, yaitu data yang tersedia terbagi menjadi data untuk laki-laki dan data untuk perempuan (*United Nations*, 1995). Rasio yang paling sering digunakan dalam diskusi masalah-masalah jender internasional adalah rasio jenis kelamin. Akan tetapi rasio juga dapat dikembangkan pada yang lain seperti penggunaan waktu, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

- c. Data harus tepat waktu dan dapat diandalkan. Data yang tersedia mungkin tidak bertepatan waktu dengan jadwal perencanaan. Sebagai contoh, survei/sensus biasanya dilaksanakan setiap 10 tahun sehingga data yang dihasilkan pada survei-survei tersebut sudah terlalu tua untuk digunakan sebagai data dasar. Di banyak negara data yang didapat tidak dapat diandalkan, khususnya pada hal-hal seperti pekerjaan perempuan (dibayar atau tidak dibayar). Data tersebut juga harus diperhatikan dengan jeli untuk menghindari bias di sensus dan survei lainnya.
- d. Tahun dasar ketika suatu kemajuan akan mulai diukur harus ditentukan. Ketika suatu program atau proyek mulai dilaksanakan, harus dilakukan survei *baseline* sehingga data yang diperoleh dari survei ini dapat dibandingkan dengan data ketika program atau proyek sedang atau sudah selesai dilakukan. Dengan perbandingan itu, kemajuan kelompok sasaran program dapat diketahui.
- e. Sebanyak mungkin *stakeholder* harus terlibat dalam pemilihan indikator. Indikator jender tidak boleh hanya menjadi urusan para ahli, akan tetapi harus juga mengikutsertakan sebanyak mungkin *stakeholder* dengan syarat tersedianya waktu dan sumber daya. Alasannya adalah bahwa para ahli juga mempunyai pertimbangan sendiri yang mungkin dapat dikoreksi dalam kaitannya dengan hubungan jender yang sebenarnya terjadi di lapangan, mengingat bahwa keadaan yang umumnya terjadi di satu daerah tidak berlaku di daerah lain.

### C. Tahap-tahap Penyusunan Rencana Program

Rencana program pembangunan responsif jender sebagaimana rencana program pembangunan yang lain, jika dilihat dari segi proses pembentukannya dapat dibagi menjadi dua, yakni: (1) rencana program pembangunan baru dan (2) reformulasi program. Rencana program pembangunan baru merupakan rencana program yang baru dilaksanakan pada tahun berjalan serta belum pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya di suatu wilayah kerja. Sementara itu reformulasi program merupakan program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun (-tahun) sebelumnya kemudian rencana tersebut disusun lagi dengan sejumlah modifikasi (perbaikan) dalam berbagai aspek (tujuan, sasaran, metode, indikator, dan sebagainya). Dalam perspektif jender, reformulasi program merupakan perumusan kembali rencana program sebelumnya yang kurang (tidak) responsif jender menjadi rencana program responsif jender. Upaya reformulasi program dapat dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan tahun anggaran berjalan sebelum program pembangunan dijalankan. Perumusan kembali tersebut meliputi antara lain:

Proses perumusan rencana program dengan melibatkan peran serta laki-laki dan perempuan secara lebih berimbang (setara).

Pemakaian data terpilah jender sebagai dasar (rasionalisasi) lahirnya sebuah program pembangunan.

Perumusan tujuan yang lebih responsif jender.

Penajaman kelompok sasaran program dengan lebih memperhatikan kondisi kesetaraan jender di wilayah kerja. Jika dalam rencana program sebelumnya kelompok sasaran belum secara spesifik dibedakan antara laki-laki dan perempuan, maka dalam reformulasi program, kelompok sasaran tersebut disebutkan secara jelas proporsi untuk laki-laki dan perempuan. Penajaman kelompok sasaran ini merupakan refleksi dari upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan jender di wilayah kerja.

Modifikasi metode yang digunakan untuk menjalankan program. Hal ini sangat berkaitan dengan perubahan pada poin-poin sebelumnya. Artinya perubahan metode pelaksanaan program merupakan

konsekuensi logis dari berbagai perubahan pada aspek rencana program yang lain.

- Modifikasi instrumen monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang lebih responsif jender. Dalam hal ini termasuk pula pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri yang melibatkan peran laki-laki dan perempuan secara lebih berimbang (setara).

Selanjutnya dari segi prosesnya, terdapat perbedaan tahapan penyusunan antara rencana program baru dengan reformulasi program. Tahapan penyusunan tersebut dijelaskan dalam uraian berikut:

### **1. Rencana Program Baru**

Rencana program pembangunan baru yang responsif jender merupakan rencana program yang disusun berdasarkan kondisi kesetaraan jender yang memprihatinkan serta belum ada upaya-upaya sistematis yang dilakukan sebelumnya, baik oleh sektor maupun masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, di Kabupaten A diketahui bahwa peran perempuan dalam dunia politik sangat rendah. Hal ini dilihat dari berbagai hal seperti persentase perempuan di parlemen, persentase perempuan yang menjadi pengurus partai politik lokal (DPC), persentase perempuan yang menduduki jabatan publik (camat, lurah, kepala urusan, kepala dusun dan sebagainya), persentase perempuan pemimpin lembaga-lembaga lokal (BPD, RT/RW, Karang Taruna dan sebagainya), serta masih banyak ditemukan pandangan-pandangan yang menghambat perempuan terjun ke dunia politik. Berdasarkan kondisi seperti itu, para perencana pembangun, di Kabupaten A merancang program penyetaraan jender dalam bidang politik. Program tersebut berjudul "program peningkatan peran perempuan dalam politik", dan program tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya.

Untuk merancang program seperti ini, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

**a. Merumuskan Tujuan Program**

Tujuan adalah situasi di masa datang yang ingin dicapai. Tujuan program hendaknya ringkas namun jelas serta dapat diukur/dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Salahsatu pedoman dalam merumuskan tujuan adalah prinsip SMART. Artinya *Specific*/khusus, *Measurable*/dapat diukur, *Achievable*/dapat dicapai, *Realistic*/realistis (nyata), *Time limit*/dibatasi waktu. Untuk contoh di atas tujuannya adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya peran perempuan dalam parlemen sebesar 10% pada tahun 2005
- Meningkatnya peran perempuan dalam kepemimpinan lembaga lokal sebesar 20% pada tahun 2005
- Dst.

**b. Menentukan Sasaran Program**

Untuk menentukan sasaran program hendaknya didasarkan kondisi kesetaraan jender yang ada di wilayah kerja. Dalam kasus ini, mengingat ketimpangan jender dalam bidang politik di Kabupaten A sangat tinggi, dalam arti peran perempuan dalam politik sangat rendah jika dibandingkan laki-laki, maka sasaran program tersebut adalah perempuan. Selanjutnya ditentukan seberapa banyak perempuan yang diharapkan akan terlibat dalam program tersebut. Misalnya program tersebut meliputi 30 desa dari 10 kecamatan. Tiap desa diambil 10 orang perempuan dan seterusnya.

**c. Mengumpulkan Data (Terpilah Jender) Pendukung**

Data terpilah jender yang diperlukan untuk menyusun program hendaknya merupakan data mutakhir. Data tersebut menjadi data dasar (baseline) yang akan dilihat perkembangannya setelah program berjalan dalam kurun waktu tertentu. Data yang diperlukan sejauh mungkin merupakan data kuantitatif dan hasil pendataan (survei) yang dilakukan lembaga resmi. Namun jika tidak tersedia

data kuantitatif maka dapat diupayakan melalui analisis tertentu untuk memperoleh data terpilah jender kualitatif (lihat bab Data Terpilah Jender). Data terpilah jender yang diperlukan dalam hal ini antara lain: jumlah anggota parlemen (DPRD) menurut jenis kelamin, jumlah pemimpin lembaga lokal menurut jenis kelamin, jumlah pejabat publik menurut jenis kelamin, dan sebagainya. Sumber data tersebut dapat berasal dari kantor BPS, Linmas, kantor sekretariat dewan, ataupun instansi resmi lain yang memiliki data tersebut.

Data tersebut di atas dapat menunjukkan masalah yang terjadi di Kabupaten A, yakni berupa tingkat kesenjangan jender dalam bidang politik. Dengan dicantulkannya data terpilah jender, maka akan terdapat alasan yang kuat untuk melaksanakan suatu program/kebijakan penyetaraan jender. Data terpilah jender dengan demikian merupakan rasionalisasi program. Selanjutnya data yang sama dikumpulkan kembali setelah program dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Sebagai indikator dampak (*outcome indicators*), dalam jangka panjang (misalnya 5 tahun) dapat diketahui apakah telah terjadi perubahan posisi kesetaraan jender dalam bidang politik. Selain itu upaya ini juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas program. Kelemahan-kelemahan program tersebut juga perlu diidentifikasi, sehingga di masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan baik yang menyangkut sasaran, sumberdaya yang diperlukan, metode yang digunakan dan sebagainya.

#### **d. Melakukan Analisis Jender**

Langkah selanjutnya setelah diketahui adanya kesenjangan jender adalah dengan melakukan analisis jender yang meliputi identifikasi kesenjangan dilihat dari 4 aspek (akses, peran/partisipasi, kontrol, dan manfaat). Dari aspek partisipasi, sebenarnya sudah diketahui kesenjangannya, hanya tinggal dari aspek akses, kontrol dan manfaat. Setelah diketahui aspek-aspek kesenjangan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya yang biasanya dilihat dari faktor sosial budaya (struktur sosial, tata nilai, pandangan masyarakat), faktor agama (penafsiran terhadap ayat-ayat suci), faktor ekonomi, dan faktor-faktor lain yang

dianggap perlu (misalnya kebijakan pemerintah, peraturan, dsb) Faktor-faktor tersebut dipandang mempengaruhi baik akses, peran, kontrol, dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu (dalam contoh kasus ini dalam bidang politik).

#### e. Merumuskan indikator responsif jender

Indikator responsif jender yang dirumuskan hendaknya memenuhi kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip penyusunan indikator responsif jender (lihat bab indikator responsif jender). Dalam contoh kasus ini misalnya rumusan indikatornya:

- % perempuan di parlemen lokal (DPRD kabupaten A).
- % perempuan yang menduduki jabatan publik.
- % perempuan yang menjadi pemimpin lembaga lokal
- dst.

## 2. Reformulasi Program

Reformulasi program pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi yang dimaksud adalah penilaian terhadap program apakah telah responsif jender atau belum (kurang). Syarat-syarat program pembangunan yang responsif jender sebagaimana uraian di muka pada bab ini, merupakan dasar penilaian terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan. Jadi dengan demikian program pembangunan yang merupakan reformulasi program adalah rencana program yang akan dilaksanakan lagi pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi terhadap program yang sama yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun proses penyusunan rencana program (reformulasi program) pada dasarnya sama dengan rencana program baru, hanya saja bedanya terdapat proses evaluasi pada setiap tahapan penyusunan.

Sebagai contoh, di kabupaten A, akan dilaksanakan (dilanjutkan) lagi program "pewilayahan komoditas perikanan dan peternakan", maka yang harus dilakukan oleh para perencana pembangunan di kabupaten tersebut adalah mengevaluasi:

- Apakah tujuan pada program yang lalu telah responsif jender?
- Apakah program yang lalu telah menggunakan data terpilah jender?
- Apakah program yang lalu telah menentukan sasaran yang adil jender?
- Apakah program yang lalu telah melakukan analisis jender dengan tepat?
- Apakah program yang lalu telah merumuskan indikator responsif jender?

Jika jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut "belum", maka yang harus dilakukan adalah menyusun program berdasarkan langkah-langkah seperti yang telah diuraikan di muka. Selain itu, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah dalam proses penyusunan tersebut harus melibatkan peran laki-laki dan perempuan secara berimbang.



## BAB 4

# ALAT ANALISIS JENDER

### A. Pengantar

Analisis jender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif jender. Untuk analisis jender diperlukan data jender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang terpisahkan antara laki-laki dan perempuan. Data jender ini kemudian disusun menjadi indikator jender.

Untuk memudahkan pemahaman dan mengaplikasikan analisis jender, terlebih dahulu perlu diketahui dan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

Menghimpun masalah-masalah kesenjangan jender, faktor-faktor penyebab dan upaya pemecahannya. Masalah-masalah yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori bidang pembangunan dan dibahas bersama-sama lintas sektor terkait untuk menentukan alternatif pemecahan.

Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan jender yang biasanya terjadi karena adanya diskriminasi antara kondisi sebagaimana yang diciptakan (kondisi normatif) dengan kondisi sebagaimana adanya (kondisi obyektif). Diskriminasi berakar kuat dalam tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini kadangkala didukung dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku dalam kehidupan birokrasi dan organisasi

kemasyarakatan. Kesenjangan jender yang sering ditemukan dalam bidang pembangunan antara lain:

- Bidang Pendidikan
- Bidang Kesehatan
- Bidang Keluarga Berencana
- Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan
- Bidang Politik
- Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Bidang Kesejahteraan Sosial, dll.

3. Mengidentifikasi kesenjangan jender dari aspek: peran, akses, kontrol, dan manfaat, guna menentukan isu jender secara menyeluruh.
4. Mengidentifikasi langkah-langkah intervensi atau tindakan yang diperlukan, yang merupakan kebijakan, program serta rencana kegiatan yang dimungkinkan untuk dapat direalisasikan dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki.

## **B. Pengertian**

1. **Analisis jender:** adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
2. **Data terpilah:** adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.
3. **Data kuantitatif:** nilai variabel yang terukur.
4. **Data kualitatif:** nilai variabel yang tidak terukur dan sering dibuat atribut.
5. **Akses:** adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
6. **Peran:** adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

7. **Kontrol:** adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
8. **Manfaat:** adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
9. **Indikator:** adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.
10. **Kegiatan produktif:** yaitu kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumberdaya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggungjawab domestik atau kemasyarakatan.
11. **Kegiatan reproduktif:** yaitu kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumberdaya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggungjawab domestik atau kemasyarakatan.
12. **Kegiatan politik dan sosial budaya:** yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumberdaya yang digunakan oleh setiap orang seperti air, sekolah dan pendidikan. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang dan juga bisa tidak.

### C. Teknik-teknik Analisis Gender

Ada beberapa model teknik analisis gender yang pernah dikembangkan para ahli antara lain: Model Harvard, Model Moser, Model SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*), Model *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan lain-lain. Untuk mengenal teknik analisis gender tersebut, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Teknik Analisis Model Harvard

Analisis model Harvard atau Kerangka analisis Harvard, dikembangkan oleh *Harvard Institute International Development*, bekerjasama dengan kantor *Women in Development (WID) - USAID*. Model Harvard ini didasarkan pada beberapa pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal.

### Tujuan dan Kerangka Harvard:

1. Untuk menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki secara rasional.
2. Untuk membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh.
3. Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal.
4. Untuk memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

Kerangka ini terdiri atas sebuah matriks yang mengumpulkan pada tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga), meliputi empat komponen yang berhubungan satu dengan lainnya.

### 1. Profil Kegiatan

Didasarkan pada konsep pembagian dengan data terpilah jenis kelamin. Profil kegiatan ini merinci kegiatan yang nyata menurut umur (siapa mengerjakan apa), penjadwalan (alokasi waktu) untuk kelompok-kelompok sosial ekonomi. Untuk memudahkan analisis, maka secara umum profil kegiatan dikelompokkan menjadi kegiatan produktif, kegiatan reproduktif, sosial budaya dan kemasyarakatan.

Parameter yang dipergunakan untuk melukiskan kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- a. **Umur:** mengidentifikasi apakah orang dewasa perempuan dan laki-laki serta anak-anak melakukan suatu kegiatan tertentu. Pemetaan umur dapat mengungkapkan pola relasi jender dalam kegiatan dan dapat pula mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan.
- b. **Alokasi waktu:** menegaskan waktu itu dialokasikan bagi setiap kegiatan dan apakah kegiatan itu musiman atau harian.
- c. **Lokasi kegiatan:** menegaskan di mana kegiatan itu dilaksanakan, di rumah, di sawah, di pasar, di kebun, di dalam keluarga atau di masyarakat.
- d. **Pendapatan:** melukiskan jumlah uang yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu kegiatan. Penghitungan dapat disesuaikan menurut jenis kegiatan, misalnya perjam, per hari, per bulan, per musim dan sebagainya.

Proses pengidentifikasian kegiatan jender melalui profil kegiatan ini, merupakan suatu teknik untuk mengetahui secara tepat mengenai peranan, kegiatan, sekaligus kebutuhan laki-laki maupun perempuan dalam suatu unit keluarga dan masyarakat.

## **2. Profil Akses dan Kontrol**

Merinci sumber-sumber apa yang dikuasai oleh laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan tersebut. Profil ini memperlihatkan siapa yang memiliki akses kepada sumberdaya dan kontrol atas penggunaannya, selanjutnya diidentifikasi, disusun dalam daftar apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses atau tidak kepada sumber daya dan kontrol atas penggunaannya.

## **3. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan, akses dan kontrol**

Berpusat pada faktor-faktor dasar, yang menentukan pembagian kerja berdasarkan jender. Analisis disini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada butir a dan b. Karena pekerjaan yang dilakukan laki-laki dan

perempuan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari proses pembangunan atau perubahan-perubahan lingkungan, maka pengertian tentang kecenderungan-kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial budaya harus turut diperhitungkan dalam analisis ini.

#### **4. Analisis Siklus Proyek**

Terdiri dari penelaahan proyek berdasarkan data yang diperoleh dari analisis terdahulu, dengan menanyakan kegiatan-kegiatan yang akan dipengaruhi oleh proyek dan bagaimana permasalahan akses, kontrol terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

Faktor-faktor inilah yang merupakan penghubung bagi terwujudnya dampak proyek pada kesetaraan gender. Analisis ini membantu menunjukkan bagian-bagian proyek yang perlu disesuaikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa aspek dalam siklus proyek yang perlu dilakukan secara rinci yaitu analisis keadaan (identifikasi masalah), rancangan/desain proyek, implementasi proyek serta pemantauan dan evaluasi proyek.

Penggunaan kerangka analisis Harvard:

- Lebih cocok untuk perencanaan proyek dibandingkan dengan perencanaan program atau kebijakan.
- Dapat digunakan sebagai "titik masuk" (*entry point*) gender netral ketika melontarkan isu gender kepada peserta yang resisten terhadap adanya ketimpangan dalam relasi gender.
- Untuk menyimpulkan data basis atau data dasar.
- Digunakan bersamaan dengan kerangka analisis Moser untuk mencari gagasan dan menentukan kebutuhan strategik gender.

#### **2. Teknik Analisis Model Moser**

Teknik analisis model Moser atau disebut juga Kerangka Moser, didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat "teknis

dan politik". Kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam proses perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu "debat". Ada enam alat yang dipergunakan kerangka ini dalam perencanaan untuk semua tingkatan, dari proyek sampai perencanaan daerah.

#### **Alat 1: Identifikasi Peranan Jender ("Tri Peranan")**

Seperti halnya Kerangka Harvard, alat ini mencakup penyusunan pembagian kerja jender/pemetaan aktivitas laki-laki dan perempuan (termasuk anak perempuan dan anak laki-laki) dalam rumahtangga selama periode 24 jam. Di samping itu, yang dimaksud dengan "tri peranan" dalam Moser, adalah sama dengan kerangka Harvard, membagi peranan perempuan yang berpendapatan rendah ke dalam "peranan" produktif, "reproduktif" dan "kemasyarakatan" atau "kerja sosial".

#### **Alat 2: Penilaian Kebutuhan Jender**

Moser mengembangkan alat ini dari konsep minat/kebutuhan jender dari sudut perempuan yang pertama kalinya dikembangkan oleh Maxine Molyneux pada tahun 1984. Perempuan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki karena "tri peranan" mereka sebagaimana posisi subordinat mereka terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dibedakan ke dalam minat/kebutuhan praktis jender dan strategis jender.

##### **Kebutuhan Praktis Jender**

Kebutuhan ini dapat diidentifikasi dengan mudah oleh perempuan dan laki-laki karena selalu berhubungan dengan kondisi kehidupan. Perempuan dapat mengidentifikasi air bersih, makanan, pemeliharaan kesehatan dan penghasilan tunai sebagai minat/kebutuhan yang harus segera mereka penuhi. Memenuhi kebutuhan praktis perempuan sangat penting untuk memperbaiki kondisi kehidupan, tetapi pemenuhan kebutuhan praktis tidak akan merubah

posisi perempuan yang lemah (subordinat). Malahan dalam kenyataannya memperkuat pembagian kerja jender.

**b. Kebutuhan Strategis Jender**

Kebutuhan perempuan sendiri diidentifikasi sebagai kebutuhan yang disebabkan posisi subordinat mereka. Hal ini berhubungan dengan isu minat/kebutuhan strategis jender adalah semua hal yang oleh kekuasaan dan kontrol, sampai pada eksploitasi karena pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.

Kebutuhan strategis dapat mencakup perubahan-perubahan dalam pembagian kerja jender (perempuan melakukan pekerjaan yang secara tradisional yang secara tradisional bukan sebagai pekerjaan perempuan, laki-laki mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam pekerjaan domestik dan pengurusan anak), hak-hak legal, penghapusan tindak kekerasan, upah yang sama/setara dan kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri.

Perempuan sendiri tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan itu semudah mengidentifikasi kebutuhan praktis jender. Oleh karena itu dibutuhkan kesempatan khusus untuk melakukannya. Kebutuhan praktis dan strategis jender harus dilihat tidak sepenuhnya berbeda dan terpisah, tetapi sebagai suatu kebutuhan yang berlanjut seperti dengan memberi konsultasi pada perempuan tentang kebutuhan praktis jender mereka, pada akhirnya bisa menghantar kepada terciptanya kesetaraan jender dimana kebutuhan strategis jender terpenuhi.

**Alat 3: Pendisagresian (pemisahan) kontrol atas sumberdaya dan pengambilan keputusan dalam rumahtangga (alokasi sumberdaya intra rumahtangga dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam rumahtangga)**

Alat ini digunakan untuk menemukan siapa yang mengontrol sumberdaya dalam rumahtangga, siapa yang mengambil keputusan penggunaan sumberdaya dan bagaimana keputusan itu dibuat.



#### **Alat 4: Menyeimbangkan Peranan**

Sangat berhubungan dengan bagaimana perempuan mengelola keseimbangan antara tugas-tugas produktif, reproduktif dan domestik masyarakat mereka. Termasuk mempertanyakan tentang "apakah suatu intervensi yang direncanakan akan meningkatkan beban kerja perempuan pada satu peranan dengan konsekuensi terhadap peranan perempuan lainnya"?

#### **Alat 5: Matriks Kebijakan WID (*Women in Development*)/GAD (*Gender and Development*)**

Matriks kebijakan *Women in Development* (WID)/*Gender and Development* (GAD) memberikan suatu kerangka untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang sedang (atau dapat) digunakan untuk tujuan pada tri peranan, serta kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis jender pada perempuan dalam proyek dan program. Matriks ini dibedakan ke dalam 5 pendekatan.

##### **Kesejahteraan**

Pendekatan ini ditujukan untuk membawa perempuan ke dalam pembangunan agar menjadi ibu baik. Selama ini perempuan dipandang sebagai penikmat pasif pembangunan. Pendekatan ini mengakui reproduktif perempuan dan berusaha memenuhi kebutuhan praktis jender (KPG) melalui suatu uluran bantuan yang bersifat dari atas (*top down*), berupa pangan, ukuran-ukuran untuk mengatasi malnutrisi dan keluarga berencana. Pendekatan ini tidak menentang (tidak menimbulkan konflik), karenanya masih sangat populer.

##### **Keadilan**

Pendekatan WID yang pertama, muncul pada dekade 1976-1985, dalam konteks paradigma pembangunan "pertumbuhan dengan keadilan". Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh keadilan bagi perempuan yang dipandang sebagai partisipan aktif dalam pembangunan. Pendekatan ini mengakui tri peranan, dan berusaha

memenuhi kebutuhan strategis jender (KSG), melalui intervensi langsung pemerintah dengan memberikan otonomi politik dan ekonomi serta mengurangi ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki. Pendekatan ini menantang subordinasi perempuan. Pendekatan ini dikritisi sebagai feminisme Barat, dianggap mengancam dan tidak populer di kalangan pemerintah.

**c. Anti Kemiskinan**

Merupakan pendekatan WID kedua, diadopsi sejak tahun 1970-an dan merupakan kebalikan dari versi keadilan, menggunakan konteks pendekatan "kebutuhan dasar terhadap pembangunan". Tujuannya untuk menjamin agar perempuan miskin meningkatkan produktivitasnya. Kemiskinan perempuan dianggap sebagai suatu masalah keterbelakangan, bukan karena subordinasi. Pendekatan ini mengakui peranan produktif perempuan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis untuk memperoleh pendapatan, khususnya dalam proyek-proyek peningkatan pendapatan berskala kecil.

**d. Efisiensi**

Pendekatan WID ketiga dan sekarang menjadi pendekatan yang utama, diadopsi sejak krisis hutang pada tahun 1980. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif melalui kontribusi ekonomi perempuan, dimana partisipasi sering disamakan dengan keadilan. Pendekatan ini berusaha untuk memenuhi KPG dengan mengandalkan pada tri peranan dan konsep waktu perempuan yang elastis. Pada prinsipnya perempuan dipandang dalam kaitannya dengan kapasitas mereka untuk mengkompensasi bagi menurunnya pelayanan sosial dengan memperpanjang hari kerja mereka.

**e. Pemberdayaan**

Pendekatan yang terakhir, diartikulasikan oleh perempuan dunia ketiga. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui kepercayaan diri yang lebih besar. Sub ordinasi perempuan diekspresikan tidak hanya disebabkan oleh dominasi laki-laki, tetapi

juga karena penindasan kolonial dan neo kolonial. Pendekatan ini mengakui tri peranan dan berusaha memenuhi KSG secara tidak langsung melalui mobilisasi KPG dari bawah. Pendekatan ini secara potensial menantang, meskipun penghindarannya dari feminisme Barat membuat pendekatan ini tidak populer, kecuali di kalangan LSM di negara ketiga.

#### **Alat 6; Melibatkan Perempuan, Organisasi Penyadaran Gender dan Perencana dalam Perencanaan**

Tujuan dari alat ini untuk memastikan bahwa KPG dan KSG diidentifikasi dan dijamin sebagai "kebutuhan-kebutuhan nyata" perempuan, berlawanan dengan pengertian atas kebutuhan-kebutuhan yang digabungkan ke dalam proses perencanaan selama ini.

#### ***Kegunaan dan Keterbatasan Kerangka Analisis Gender Model Moser***

##### **Kegunaan**

Kerangka Moser telah dianjurkan secara meluas dan dapat digunakan untuk perencanaan dengan beragam latar belakang, dari LSM sampai ke sektor-sektor dalam pemerintahan. Diakui bahwa mungkin ada resistensi secara kelembagaan dan politik dalam mengarahkan dan mentransformasikan hubungan-hubungan gender. Pendekatannya untuk perencanaan menantang relasi gender yang tidak setara dan mendukung pemberdayaan perempuan. Konsep KPG dan KSG merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengevaluasi dampak suatu intervensi pembangunan terhadap relasi gender. Konsep tri peranan berguna dalam membuka pikiran mengenai rentang yang luas atas pekerjaan dimana perempuan terlibat. Lebih jauh, konsep tersebut mengingatkan para perencana terhadap keterhubungan antara peranan-peranan reproduktif, produktif dan kerja sosial.

- **Keterbatasan**

Kerangka kerja ini melihat pada pemisahan aktivitas-aktivitas perempuan dan laki-laki ketimbang melihat tentang bagaimana aktivitas tersebut saling berhubungan. Tidak setiap orang menerima konsep tri peranan, khususnya dalam kaitannya dengan peranan komunitas (masyarakat). Bentuk-bentuk lain dari ketidaksetaraan seperti halnya kelas dan ras, tidak diperhatikan. Beberapa orang juga menyatakan bahwa pembagian tugas antara kebutuhan-kebutuhan strategis dan praktis tidak membantu, karena seringkali ada keberlangsungan dari kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Moser tidak memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan strategis laki-laki. Terdapat banyak argumen untuk menentang pemasukan mereka. Dalam mengadaptasi karya Moser, Development Planning Unit pada Universitas London telah memasukkan KPG dan KSG laki-laki ke dalam kerangka tersebut.

### **3. Teknik Analisis Kekapan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)**

Teknik ini disebut juga sebagai SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Teknik ini merupakan suatu teknik analisis manajemen dengan cara mengidentifikasi secara "internal" mengenai kekuatan dan kelemahan dan secara "eksternal" mengenai peluang dan ancaman. Aspek internal dan eksternal tersebut dipertimbangkan dalam kaitan dengan konsep strategis dalam rangka menyusun program aksi, langkah-langkah/tindakan untuk mencapai sasaran maupun tujuan kegiatan dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman sehingga dapat mengurangi resiko dan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dalam analisis SWOT ada 5 (lima) langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Langkah pertama, mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan**  
Lakukan identifikasi masalah internal sebanyak-banyaknya mengenai kekuatan dan kelemahan keadaan sekarang, berikan bobot untuk kondisi yang diinginkan.

- b. **Langkah kedua, mengidentifikasi "peluang dan ancaman"**  
Lakukan identifikasi masalah secara eksternal, tetapkan bobot masing-masing sebagai kondisi yang diinginkan dan tetapkan rangking yang menggambarkan keadaan sekarang (apa adanya).
- c. **Langkah Ketiga, analisis keterhubungan kunci internal dan eksternal**  
Lakukan analisis keterhubungan dan tahap pencocokan (TOWS) dengan membuat kuadran. Kuadran I (strategi SO) menciptakan strategi dengan menggunakan/mengembangkan kekuatan-kekuatan (*strengths*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*). Strategi yang digunakan adalah "agresif".
- d. **Langkah keempat, menyusun Rencana Aksi (POA) yang berisi kegiatan jender dengan cara:**
- Susunlah langkah/tindakan berdasarkan konsep yang bernilai strategis.
  - Langkah/tindakan diurut dari awal sampai akhir.
  - Sediakan tujuan dan sasaran dalam setiap langkah dan tindakan
  - Tetapkan penanggungjawab setiap langkah tindakan.
  - Tetapkanlah waktu dan besarnya anggaran setiap langkah tindakan
  - Tetapkan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan
  - Tetapkan indikator penilaian
- e. **Langkah kelima, Penjadwalan**  
Menyusun sketsa bagan yang menunjukkan rangkaian kegiatan khusus dilihat dari segi waktu pelaksanaan dan rencana kegiatan.

#### 4. Teknik Analisis Model GAP (*Gender Analysis Pathway*)

##### a. Pengertian

Metode GAP merupakan metode yang telah banyak dikembangkan di Indonesia terutama dalam proses perencanaan program-program yang responsif jender. Metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui

kesenjangan jender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat, kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan yang menjadi pokok bahasan, mulai dari aspek kebijakan sampai monitoring dan evaluasi.

Metode GAP dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menetapkan program-program pembangunan, meningkatkan wawasan pentingnya efektifitas dan efisiensi, serta kelayakan perencanaan pembangunan yang selalu memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian metode GAP dapat digunakan para perencana dan pelaksana program pembangunan, untuk menetapkan prioritas permasalahan serta solusi atau intervensi yang diperlukan.

#### **b. Rasionalisasi Penggunaan GAP**

1. GBHN dan Propenas yang mengisyaratkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Pembangunan Nasional, terutama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender (KKG).
2. Falsafah KKG pada dasarnya sudah diamanatkan sejak UUD 1945, yang tidak membedakan warga negara atas laki-laki dan perempuan. Atas dasar itu kesenjangan jender harus menjadi pertimbangan untuk dihindari dan dipecahkan melalui kebijakan, perencanaan, dan pemantauan.
3. Metode GAP merupakan metode yang sudah diujicobakan oleh Bappenas yang ternyata dapat membantu perencana dan pelaksana program pembangunan.

#### **c. Langkah-langkah (alur kerja analisis)**

##### **1. Langkah pertama**

Melakukan analisis bias jender yang ada di wilayah garapan. Analisis bias jender ini meliputi kesenjangan dalam faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Lakukan dengan menggunakan matrik sebagai berikut:

**Matrik 1**  
**Identifikasi Masalah Jender**

No.	Identifikasi Masalah	Penyebab Masalah			Ket
		Faktor Sosial Budaya	Faktor Agama	Faktor Sosek	
1	2	3	4	5	6
1	Peran serta dlm prog KB bagi laki-laki sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suami tidak pantas ikut KB</li> <li>• KB Urusan perempuan</li> </ul>		Terbatasnya kontrasepsi yang murah bagi laki-laki	

**Petunjuk Pengisian:**

**Kolom 1 :** Nomor Pengisian cukup jelas

**Kolom 2 :** Diisi dengan masalah-masalah bias jender yang ada di suatu wilayah, administratif, bisa ditinjau berdasarkan individu, institusi ataupun propinsi. Untuk selanjutnya diidentifikasi penyebab masalahnya.

**Kolom 3 :** Masalah sosial budaya yang menjadi penyebab bias jender

**Kolom 4 :** Masalah yang berkaitan dengan pemahaman agama yang menjadi penyebab bias jender.

**Kolom 5 :** Faktor sosial ekonomi yang menyebabkan bias jender

**Kolom 6 :** diisi dengan penjelasan penting.

**2. Langkah Kedua**

Lakukan diskusi dengan tim untuk membangun matrik analisis jender yang merupakan awal dari alur analisis jender. Hal yang dibahas dalam matrik ini adalah kebijakan saat ini, data terpilah, faktor kesejangan dalam akses, peran, kontrol, manfaat, serta isu jender yang menonjol. Untuk mengungkapkan isu yang ada gunakan matrik di bawan ini:

## Matriki II Analisis Jender

Kebijakan Saat Ini	Data Terpilah	Dimensi Kesejangan Jender				Isu Jender	Ket
		Akses	Peran	Kontrol	Manfaat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Peran serta Laki-laki dlm KB perlu ditingkatkan	Peserta KB laki 1,38%. perp.: 98,62%	Pelayanan KB: sebagian besar unt. perempuan	Peran laki-laki kecil	Laki-laki memegang kontrol (keputusan) dalam ber-KB	Laki-laki lebih banyak daripada perempuan		

### Petujuk Pengisian:

- Kolom 1 : Kebijakan saat ini diisi dengan kebijakan yang dibuat saat ini tentang program/kegiatan yang dilaksanakan.
- Kolom 2 : Data terpilah diisi dengan data laki-laki dan perempuan, berkaitan dengan masalah yang terungkap dalam matriks 1.
- Kolom 3 : Diisi berdasarkan permasalahan yang terungkap dalam matrik 1, apakah kesejangan itu mengungkapkan kesenjangan dalam hal peluang memperoleh sumberdaya tertentu antara laki-laki dan perempuan.
- Kolom 4 : Diisi dengan bagaimana partisipasi antara laki-laki dan perempuan.
- Kolom 5 : Diisi dengan siapa yang paling dominan dalam mengambil keputusan
- Kolom 6 : Diisi dengan siapa yang memperoleh manfaat sumberdaya tsb.
- Kolom 7 : Diisi dengan isu jender yang dominan
- Kolom 8 : Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu

### 3. Langkah 3

Selanjutnya isilah kotak II yang berupa formulasi kebijakan jender yang baru dan indikator gender secara jelas, terukur dan dapat diaplikasikan di lapangan.



#### **4. Langkah 4**

Setelah Kebijakan baru diformulasikan selanjutnya tetapkan kegiatan-kegiatan operasional yang responsif jender dengan sasaran laki-laki dan perempuan.

#### **5. Langkah 5**

Hasil analisis jender model GAP dituangkan dalam matrik Program aksi yang berisi langkah-langkah atau intervensi yang akan dilaksanakan.

## BAB 5 DATA TERPILAH JENDER

### A. Pengantar

Saat ini data yang dikumpulkan dan tersedia bagi kebutuhan perencanaan pembangunan masih bersifat *gender blind*. Salahsatu contoh data yang bersifat *gender blind* adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Data ini merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar kekayaan suatu negara dihasilkan. Indikator ini pada umumnya meliputi pekerjaan berupah tetapi tidak termasuk pekerjaan-pekerjaan subsisten atau pekerjaan di sektor informal. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, pada umumnya laki-laki menguasai pekerjaan-pekerjaan yang berupah sementara perempuan kebanyakan berada di sektor informal dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berupah (non renumeratif), sehingga dengan demikian data tentang PDB ini tidak dapat memberikan gambaran secara komprehensif besaran kontribusi perempuan dalam pembangunan. Contoh ilustrasi ini mengisyaratkan bahwa data yang bersifat *gender blind* adalah akibat adanya kesalahpahaman terhadap konsep hubungan jender (*gender relations*). Pengumpulan data yang berperspektif jender dengan demikian tidak sekedar membedakan atau memilahkan data berdasarkan sek (jenis kelamin).

Data yang dikumpulkan tanpa memperhatikan isu-isu jender akan menghasilkan berbagai macam distorsi. Akibat penggunaan data yang bersifat *gender blind* dalam perencanaan pembangunan, mempunyai

konsekuensi berupa ketimpangan dan inefisiensi dalam program/proyek pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada data semacam itu secara tidak langsung akan berpihak kepada siapa yang paling membutuhkan dan paling produktif. Kebijakan semacam ini tentu saja berakibat memperlebar jurang ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat.

Di Indonesia, gambaran perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki biasanya menggunakan data yang dikumpulkan BPS melalui Sensus Penduduk, SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Analisis- analisis untuk menggambarkan perbedaan perempuan dan laki-laki juga dipublikasikan, termasuk "Indikator-indikator Sosial Perempuan Indonesia". Dalam publikasi ini dideskripsikan antara lain partisipasi perempuan dalam pendidikan dan angkatan kerja, kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, partisipasi sosial budaya, akses terhadap media dan partisipasi politik. Data-data seperti ini cukup tersedia di instansi pemerintah baik melalui sensus maupun survei. Namun permasalahannya, apakah data yang dikumpulkan tersebut telah perspektif gender. Sebagaimana diutarakan dimuka untuk menghasilkan data yang sensitif gender tidak sekedar membedakannya berdasarkan jenis kelamin (seks). Hal lain yang juga penting adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut dirumuskan, dan apakah konsep, definisi, dan pendekatan yang digunakan relevan dengan isu gender. Jika konsep-konsep yang digunakan untuk merancang kuesioner tidak sensitif gender, maka data yang dihasilkannya pun akan bias gender.

### 3. Pengertian

#### **Data gender blind**

Adalah keterangan atau fakta yang kurang dapat memberikan gambaran tentang keadaan atau persoalan tertentu oleh karena belum (tidak) memperhatikan aspek-aspek perbedaan relasi gender.

**b. Data sensitif jender**

Adalah keterangan atau fakta yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan atau persoalan tertentu oleh karena sudah memperhatikan aspek-aspek relasi jender. Data semacam ini dapat digunakan sebagai dasar kajian dan dasar pembuatan kebijakan.

**c. Data terpilah jender**

Adalah nilai-nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.

**d. Jender responsif**

Adalah memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada keterbatasan-keterbatasannya bagi keadilan.

**e. Jender sensitif**

Adalah kemampuan memahami ketimpangan jender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial ekonomi perempuan dibanding laki-laki.

**C. Contoh Data Gender Blind**

**Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross National Product (GNP)**

Adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kekayaan suatu negara dihasilkan oleh penduduknya. Data ini bersifat *gender blind* karena belum menggambarkan secara komprehensif besaran (agregat) kontribusi perempuan dalam pembangunan. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, kebanyakan perempuan bekerja di sektor informal dan tidak berupah dan hal itu tidak masuk dalam perhitungan.

**Kepala keluarga**

Data tentang kepala keluarga juga bersifat *gender blind* oleh karena konsep yang digunakan pada umumnya masih menggunakan

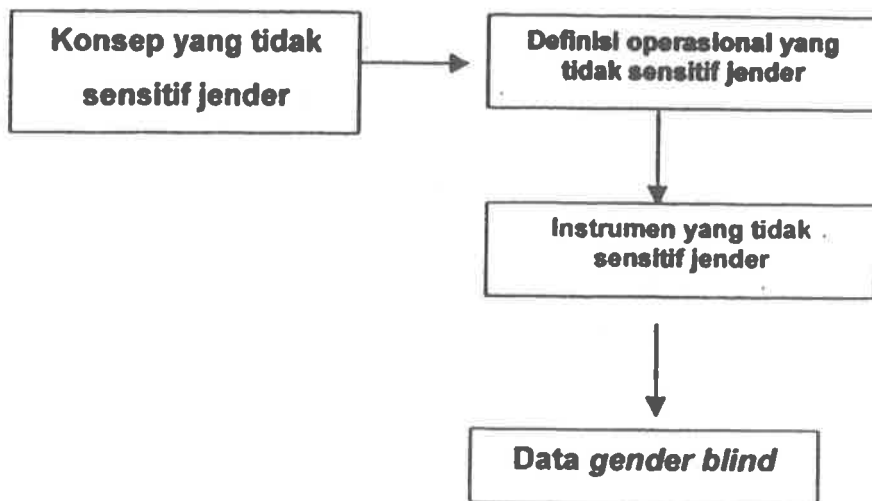
konsep sosial budaya atau secara *de jure*. Asumsi yang digunakan adalah bahwa setiap kepala keluarga adalah laki-laki. Kenyataannya banyak perempuan yang secara *de facto* merupakan pencari nafkah utama dan memegang tanggungjawab keluarga.

### Angkatan Kerja

Banyak perempuan yang bekerja namun tidak dikategorikan sebagai "bekerja", padahal kegiatan yang mereka lakukan sangat bernilai. Dalam menentukan status pekerjaan perempuan, misalnya jika suami istri bekerja bersama dalam sebuah usaha kecil seperti misalnya perdagangan, perempuan cenderung dianggap atau dikategorikan sebagai "membantu suami". Sang suami dikatakan sebagai wiraswastawan (pengusaha), meskipun dalam realitanya modal dan manajemen bisnis dipegang atau dikuasi oleh sang istri.

### Mengapa Data Bersifat Gender Blind ?

Data bersifat *gender blind* disebabkan karena konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan pengumpulan data tidak sensitif gender. Konsep yang tidak sensitif gender tersebut menghasilkan definisi operasional yang juga tidak sensitif gender dan selanjutnya rumusan pertanyaan dalam instrumen penelitian juga tidak sensitif gender.



#### **D. Contoh-Contoh Data Terpilah Jender**

Contoh data terpilah jender banyak ditemukan pada publikasi BPS mengenai profil penduduk di suatu kota, propinsi ataupun negara. Data yang paling umum yang sudah terpilah jender adalah data mengenai struktur dan komposisi penduduk yang sudah terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Dari data ini dapat diperoleh besaran angka sex rasionya, yakni perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Contoh lain data terpilah jender adalah:

1. Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1998 (Lampug Tengah Dalam Angka, 1998. BPS Lampung Tengah).
2. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)
3. Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin
4. Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin.
5. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Berbahasa Indonesia.  
(Sumber No 3 s/d 5: Indikator Kesejahteraan Sosial, Kab. Lampung Tengah, BPS Kab. Lampung Tengah)
6. Dan lain-lain.

Apabila kita cermati buku-buku publikasi yang diterbitkan oleh BPS khususnya yang menyangkut profil penduduk dan indikator kesejahteraan sosial, ternyata masih banyak data yang belum terpilah jender, meskipun sebenarnya secara teoritik data tersebut dapat dipilah. Contoh data yang belum terpilah jender misalnya:

1. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kab. Lampung Tengah Tahun 1998 (Sumber: Susenas Tahun 1998, sebagaimana dimuat di buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Lampung Tengah, 1998).
2. Rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) Menurut Umur Ibu di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1998. (Sumber: idem).

3. Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1998. (Sumber: idem).
4. Dan lain-lain.

Jika data tersebut terpilah jender tentunya akan lebih bermanfaat bagi upaya-upaya mengurangi kesenjangan jender, oleh karena para perencana pembangunan dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran. Dalam hal ini, paling tidak terdapat dua kemungkinan mengapa data yang tersedia tidak terpilah jender. Kemungkinan tersebut adalah:

- a. Desain instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data (misalnya kuesioner) memang tidak secara spesifik memisahkan antara laki-laki dan perempuan, sehingga data yang dihasilkan adalah data yang bercampur antar keduanya.
- b. Desain instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data sebenarnya sudah memilah, namun oleh karena alasan tertentu, maka data yang ditampilkan menjadi data yang tidak terpilah jender.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah data yang tidak terpilah jender dapat diubah menjadi data terpilah jender. Jawaban terhadap permasalahan ini adalah dapat sepanjang data mentah (*raw data*) yang tersedia memang terpilah jender. Hanya saja yang diperlukan selanjutnya adalah proses pengolahan data kembali, yakni memisahkan nilai-nilai dari variabel yang diukur berdasarkan jenis kelamin. Dalam batas-batas tertentu, data yang tidak terpilah jender yang sudah ditampilkan dalam bentuk tabel dapat pula dijadikan data terpilah jender, seperti contoh di bawah ini:

Tabel semula

**Tabel ...**  
**Banyaknya Akseptor Baru Menurut**  
**Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Lampung Tengah, 1998**

Kecamatan	Alat Kontrasepsi								Jumlah
	IUD	MOP	MOW	Implant	Suntik	PI	Kondom	OV	
Padang Ratu	592	2	0	1.213	1.923	2.221	100	23	6.064
Kalirejo	323	3	0	534	1.399	691	36	8	2.994
Bangun Rejo	204	0	0	351	441	355	9	0	1.360
Dst...									

Sumber: Lampung Tengah dalam Angka, 1998. BPS Lampung Tengah.

Reformasi Tabel

**Tabel ...**  
**Banyaknya Akseptor Baru Menurut**  
**Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Lampung Tengah, 1998**

Kecamatan	Alat Kontrasepsi Yang digunakan								Jumlah
	Laki-laki		Perempuan						
	MOW	Kondom	IUD	Implant	Suntik	PI	MOP	OV	
Padang Ratu	0	100	592	1.213	1.923	2.221	2	23	6.064
Kalirejo	0	36	323	534	1.399	691	3	8	2.994
Bangun Rejo	0	9	204	351	441	355	0	0	1.360
Dst..									

Data tersebut di atas dapat secara lebih cepat dan mudah menggambarkan adanya ketimpangan relasi jender khususnya dalam kaitannya dengan reproduksi. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa perempuan lebih merupakan obyek penderita oleh karena perempuan harus menggunakan alat kontrasepsi, dan mereka pula yang harus menanggung efek samping (jika hal itu ada). Padahal sebetulnya anak yang lahir bukan tanggungjawab perempuan belaka, melainkan juga laki-laki. Dalam masyarakat yang patriarkhis, pihak yang menentukan jumlah



anak adalah suami bukan istri, lalu mengapa kaum perempuan yang menjadi sasaran pokok program penurunan fertilitas (KB)?

Sementara itu data terpilah jender yang sangat penting oleh karena sangat berkaitan dengan isu ketidakadilan jender, namun hingga saat ini belum tersedia atau mungkin sangat jarang dalam publikasi kantor statistik antara lain misalnya:

1. Angka Putus Sekolah (dari SD hingga SLTA) berdasarkan jenis kelamin.
2. Jumlah Angkatan Kerja per Sektor Berdasarkan Jenis Kelamin.
3. Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin.
4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) per sektor Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin.
5. Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin.
6. Jumlah Pengurus Partai Politik dari Tingkat Kecamatan hingga Pusat Berdasarkan Jenis Kelamin.
7. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin.
8. Jumlah Pemegang Sertifikat Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin.
9. Dan lain-lain.

Sebagian data tersebut memang tidak (atau belum) tersedia oleh karena memang belum masuk dalam sistem pencacahan nasional, atau mungkin juga karena luput dari perhatian para ahli. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama, dalam rangka mengurangi ketimpangan jender yang terjadi di masyarakat.

### **E. Teknik Pengumpulan Data Terpilah Jender Kuantitatif**

Untuk menghasilkan data yang sensitif jender dengan demikian diperlukan teknik/metode pengumpulan data yang juga sensitif jender. Secara metodologis, teknik pengumpulan data sangat ditentukan jenis data yang dalam hal ini dibedakan menjadi: (a) data kualitatif dan (b) data kuantitatif. Untuk menjangkau data yang kualitatif, dalam ilmu-ilmu sosial dikenal beberapa teknik pengumpulan data yakni:

- (1) Wawancara Mendalam (*depth interview*).
- (2) *Focus Group Discussion (FGD)* dan
- (3) *PRA (Participatory Rural Appraisal)*.

Sementara itu untuk menjangkau data kuantitatif pada umumnya digunakan teknik kuesioner (angket) dan dokumentasi. Apapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan, seorang peneliti dituntut untuk memiliki kepekaan jender (sensitif jender) terutama dalam merumuskan: (1) konsep, (2) definisi operasional, dan (3) instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Kepekaan jender tentunya tidak datang dengan sendirinya melainkan hanya dapat diperoleh jika seseorang mempunyai kesadaran jender (*gender awareness*) yang cukup tinggi serta mengasahnya dengan misalnya terus mengamati gejala-gejala ketidakadilan jender yang terjadi di masyarakat sekitarnya.

Berikut ini merupakan contoh sebuah instrumen yang didesain secara khusus untuk menghasilkan data terpilah jender:

**Berapa hari kerja rata-rata yang dicurahkan oleh tenaga kerja keluarga Bapak/Ibu/Sdr setiap musim panen ?**

Sumber Tenaga Kerja Keluarga		Jenis Pekerjaan							Jml
		1	2	3	4	5	6	7	
Suami									
Istri									
Anak Perempuan	1								
	2								
	3								
Anak Laki-laki	1								
	2								
	3								
Anggota Keluarga Lain (Perempuan)	1								
	2								
	3								
Anggota Keluarga Lain (Laki-laki)	1								
	2								
	3								
Total Tng Kerja Prp.									
Total Tng Kerja Laki-laki									

### **Keterangan Tentang Jenis Pekerjaan:**

1. Persiapan lahan (membajak, *menggaru*, membuat bedeng (galut) dsb).
2. Penanaman
3. Penyiangan
4. Penyemprotan hama
5. Pemupukan
6. Pemanenan
7. Penjualan hasil (pasca panen)
8. Dst...

### **F. Teknik Pengumpulan Data Terpilah Jender Kualitatif**

Teknik pengumpulan data terpilah jender kualitatif yang bisa digunakan anatara lain:

#### **1. PRA (*Pasrticipatory Rural Appraisal*)**

PRA merupakan teknik/metode yang digunakan untuk melakukan kajian (keadaan) desa. Berbagai teknik yang digunakan berupa visual (gambar atau bentuk yang bisa dilihat) yang dipergunakan sebagai media diskusi masyarakat tentang keadaan diri mereka sendiri dan lingkungannya. Alat-alat visual ini merupakan media belajar bersama yang dipergunakan baik untuk masyarakat (petani) yang buta aksara ataupun melek aksara. Keadaan (kondisi) desa dapat dilakukan untuk penjajagan kebutuhan (*need assesment*) dan perencanaan kegiatan, selain juga dapat dilakukan untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi kegiatan. Teknik-teknik kajian desa atau teknik-teknik PRA selama ini lebih banyak dipergunakan untuk perencanaan kegiatan/program. Hal ini terjadi karena ketrampilan untuk melakukan modifikasi (penyesuaian) teknik-teknik PRA bagi kebutuhan lain, belum banyak dimiliki oleh para pemandu (aktivis).

Contoh-contoh teknik PRA yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data terpilah jender secara kualitatif:

**a. Teknik Penyusunan Kalender Musim**

Kegiatan-kegiatan dalam daur kehidupan masyarakat desa, sangat dipengaruhi oleh siklus musim, seperti musim tanam menjelang musim hujan, musim panen setelah padi menguning, musim paceklik jika kemarau terlalu panjang. Juga kegiatan atau peristiwa sosial seringkali berkaitan dengan peristiwa-peristiwa musim itu, seperti adat dan perkawinan setelah panen yang berhasil, merantau atau migrasi ke kota ketika musim paceklik. Dengan mengenali dan mengkaji pola-pola musiman ini akan terlihat pola kehidupan masyarakat yang merupakan informasi penting sebagai dasar pengembangan program.

Melalui teknik ini dapat dibahas peluang untuk melibatkan perempuan dan laki-laki dalam suatu kegiatan bersama. Cara menggambarkan aspek jender ke dalam gambar, contohnya adalah sebagai berikut:

**Kalender Musim Kegiatan**

Desa Panyipatan, Kalimantan Selatan

Sumber:

Diadopsi dari "Belajar Bersama, Berperan Setara", INSIST Yogyakarta

φ	Beternak sapi												
Ω	Beternak ayam												
Ω	Beternak bebek												
φΩ	Membuat gula aren												
- pemeliharaan-													
1	menanam	φΩ penyiangan						panen	2	3	4		
φ		Ω mencari rumput							φΩ	φ	φ	φ	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		

Keterangan simbol:

1. Menyiapkan lahan
  2. Mengolah hasil panen
  3. Menyiapkan lahan
  4. Membakar Jerami
- φ Biasanya oleh laki-laki saja  
Ω Biasanya oleh perempuan saja  
φΩ Biasanya Laki-laki dan perempuan bekerja bersama

#### **4. Kajian Mata Pencaharian Desa**

Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengenali dan menganalisis keadaan kehidupan masyarakat dari aspek mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam masyarakat, pengambilan keputusan dalam memilih mata pencaharian atau pergantian mata pencaharian, terjadi berdasarkan pengaruh tata nilai masyarakat. Juga dipengaruhi oleh keinginan baru yang terbentuk dari penambahan wawasan dan pengalaman, dan usaha untuk memperbaiki keadaan.

Mata pencaharian atau "pekerjaan" merupakan kegiatan mendasar masyarakat manapun untuk kelangsungan hidupnya. Baik itu untuk menghasilkan kebutuhan hidup sendiri, maupun untuk pertukaran atau diperjualbelikan dengan orang lain. Bila suatu program menganggap bahwa aspek mata pencaharian peserta akan dijadikan salah satu titik masuk untuk tujuan pengembangan masyarakat, maka diperlukan suatu cara yang mampu menyerap pandangan masyarakat tentang pengembangan mata pencaharian mereka. Hal ini mendasar bagi pengembangan perencanaan program.

#### **1) Tahapan yang dilakukan:**

Analisis mata pencaharian merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan pola ekonomi, kesempatan dan pembatasan unit-unit ekonomi yang berkembang di masyarakat. Mata pencaharian di bidang pertanian tentu akan berbeda dengan mata

pencaharian di bidang peternakan untuk itu tahapan yang harus dilakukan adalah dengan menggali hal sebagai berikut:

- a. jumlah tenaga kerja
- b. jumlah tenaga kerja trampil
- c. produksi dan aktivitas ekonomi
- d. pasokan bahan dasar
- e. jaring pemasaran
- f. pendapatan
- g. potensi
- h. pengeluaran
- i. masalah

Analisis mata pencaharian akan sangat membantu dalam strategi suatu program. Sebagai contoh, mata pencaharian nelayan yang sangat tergantung kondisi lautan mempunyai masalah dan kebutuhan yang khas, karena sifat mata pencahariannya tidak teratur. Demikian pula pada rumahtangga yang dikepalai perempuan yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap akan mempunyai masalah dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan pegawai negeri atau kelompok lain. Dengan analisis mata pencaharian akan diketahui pula masalah yang dihadapi oleh berbagai tingkatan sosial ekonomi yang berbeda-beda yang ada di masyarakat, sehingga apabila ada program yang dapat memecahkan masalah mereka, strateginya lebih mudah. Aspek jender pada kajian ini penting untuk diperhatikan karena diharapkan bersama masyarakat dibahas peran serta laki-laki dan perempuan di dalam pengelolaan suatu pekerjaan. Cara mencantumkan keterlibatan perempuan dan laki-laki ke dalam gambar (visual) dengan menggunakan simbol-simbol yang mudah dimengerti masyarakat.

(2) Hasil

Teknik menganalisis mata pencaharian, menghasilkan matrik analisis mata pencaharian, sebagaimana contoh-contoh berikut ini:

Contoh: Formulir ...

**ANALISIS MATA PENCAHARIAN**

RW/Dusun : .....  
 Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab/Kota : .....

Sumber Penghasilan	Tenaga Kerja		Sarana Produksi dari Luar	Produksi/ Tahun	Pemasaran	Pendapatan kotor/Tahun (Rp)	Pembatalan
	L	P					
Padi	1	10	Berih, pupuk dan obal- obatan (dari toko sarana tani)	2 ton/ha	Tengkulak	5 juta/ha	
Cabe	1	-	Berih (dari kios)	4 kg/hari	Tengkulak	3.000/kg/1x panen	
Bawang merah	1	-	Berih (dari kios)	200 kb	Tengkulak	2.000/kg	
Domba	2	1	• Beli (pasar hewan) • Bantuan dan kredit dari Desnak	-	Tengkulak	250.000-300.000/ekor	Penyakit kurus
Sapi	2	-	Beli (pasar hewan)	-	Tengkulak	2.000.000/ekor	
Itik	2	1	Beli (pasar hewan)	-	Tengkulak	3.000-25.000/ekor	
Berih tani	1	-			Tengkulak	7.000/hari	
Buruh bangunan	1	-			Tengkulak	13.000/hari	
Pengrajin aj	1	2			Tengkulak	1.500/kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pati lokal lebih mahal: Lokal Rp 1.400/kg Pabrik 1.300/kg</li> <li>• Terbatas bahan baku yaitu ketela</li> <li>• Perlu alat untuk memeras</li> </ul>
Pengrajin krupuk	1	2			Tengkulak	2.500/kg	

Sumber: PSW UGM dalam Panduan Gender dalam Perencanaan Partisipatif.

Contoh: Formulir .....

**TEKNIK ANALISIS MATA PENCAHARIAN  
PETANI JAMUR KUPING**

RW/Dusun : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kab/Kota : .....

No.	Sumber Pendapatan	Tenaga Kerja	P	Produksi	Pendapatan			Penyerasan	Permasalahan
					Kotor	Biaya	Bersih		
1	Usaha tani jamur kuping	***	***	167 kg	3.000.000	1.250.000	750.000	Dijual ke koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga rendah</li> <li>• Bibit mahal</li> <li>• Sulit alat pengering terutama musim hujan</li> </ul>
2	Usaha tani kebun campuran	***	**		1.000.000	400.000	600.000	Dijual ke pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang perawatan</li> <li>• Harga produk murah</li> </ul>
3	Usaha ternak (sapi, kambing, ayam)	***	**					Tidak dijual (untuk tabungan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diusahakan secara intensif</li> </ul>
4	Usaha tani sayuran luas 2.000 m <sup>2</sup>	***	**		2.000.000	1.000.000	1.000.000	Tengkulak	
5	Buruh tani	**	*		300.000		300.000		

Sumber: SAGA Pusat Studi UGM, 2000 dalam Panduan Gender dalam Perencanaan Partisipatif



TEKNIK ANALISIS MATA PENCAHARIAN  
 PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

RW/Dusun : .....  
 Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab./Kota : .....

Sumber	Terdapat	Input Sarana Produksi	Produksi/ tahun	Pemasaran	Pendapatan kotor/tahun (Rp)	Pemasalahan
Pembuatan Krupuk/tempong	1 (A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubi kayu</li> <li>Bumbu /rempah pisau</li> </ul>	1.800 kb	Dijual ke warung, toko, pasar kec.	3.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasaran</li> <li>Alat tradisional</li> </ul>
Perajin Bambu	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bambu</li> <li>Sartal/permis</li> </ul>	± 720 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijual ke pasar</li> <li>Kecamatan</li> <li>Beringharjo</li> <li>Keliling desa</li> </ul>	2.400.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasaran</li> <li>Kompetisi</li> <li>Belum ada produsen penampung dim jml besar</li> </ul>
Perajin tempe	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedele</li> <li>Ragi</li> <li>Kertas pembungkus</li> </ul>	± 2.800 kb bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keliling desa</li> <li>Pesanan</li> <li>Warung-warung</li> </ul>	3.600.000	Kompetisi
Perajin tikar/mendong/enceng gondok	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendong</li> <li>Enceng gondok</li> </ul>	± 48 buah	Ke pasar kecamatan	576.000	Pemasaran
Perajin mebel	3	Bambu	Tergantung pesanan (130.000/set)	Tergantung pesanan	Tidak mesti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasaran</li> <li>Modal</li> </ul>

Sumber: SAGA Pusat Studi Wanita UGM, 2000 dalam Panduan Gender dalam Perencanaan Partisipatif

### **c. Teknik Kegiatan Sehari-hari**

Teknik ini merupakan suatu cara mengenali pola kegiatan dan pola penggunaan waktu dari suatu masyarakat melalui penggambaran diagram kegiatan sehari-hari pribadi anggota masyarakat. Melalui teknik ini akan diperoleh informasi tentang pelaku pekerjaan di rumah tangga ataupun pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat produktif.

#### **(1) Tahapan (proses) yang harus dilakukan**

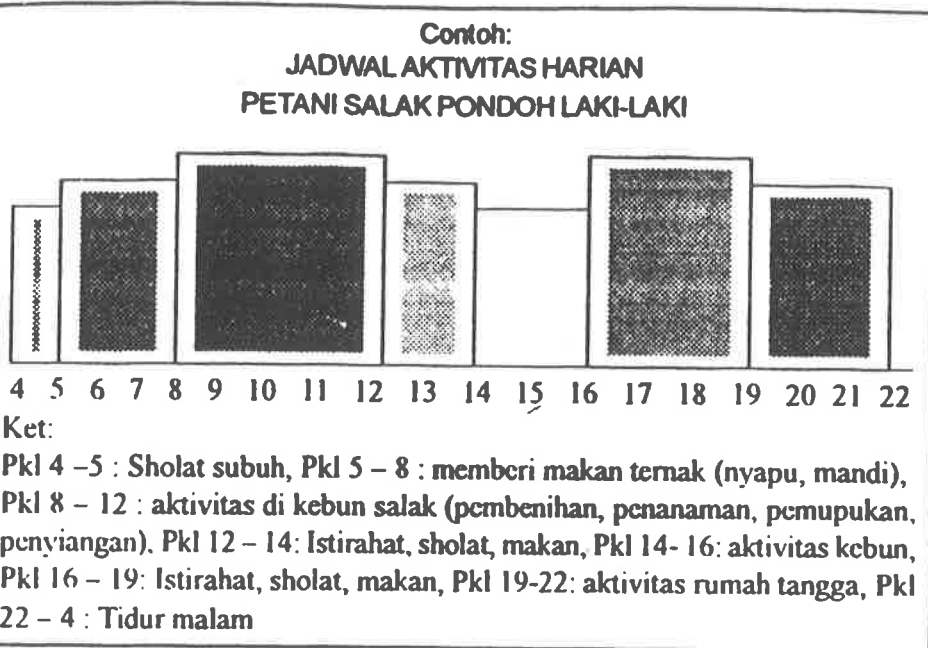
Pada teknik kegiatan sehari-hari yang pertama adalah melakukan identifikasi aktivitas harian dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- a. siapa melakukan apa diantara anggota keluarga?
- b. kapan aktivitas dilakukan?
- c. berapa lama waktu yang dilakukan?
- d. Sejauh mana beban pekerjaan masing-masing anggota keluarga?
- e. Kapan anggota keluarga mempunyai waktu luang?

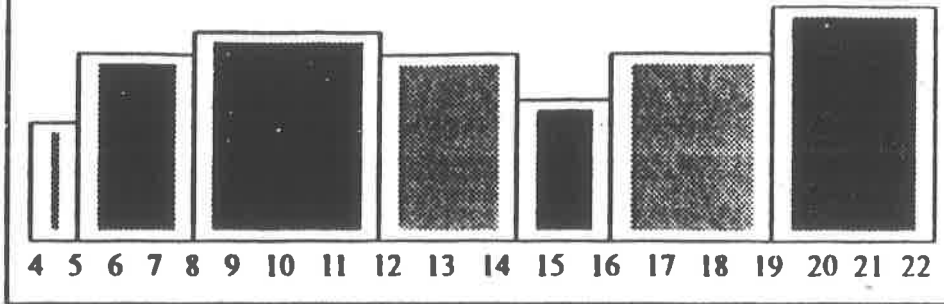
Meskipun masing-masing individu dalam keluarga mempunyai aktivitas yang berbeda namun dapat dibuat pola tertentu pada kelompok masyarakat yang homogen berdasarkan atas pekerjaan, strata sosial, agama, etnis, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan data aktivitas harian, intervensi dapat dilakukan oleh pihak luar dengan mengetahui jenis kegiatan yang dilakukan dan waktu yang dianggap paling cocok. Profil aktivitas harian dapat pula dipakai untuk menilai keadilan jender pada suatu keluarga. Diharapkan dengan profil tersebut pria akan semakin sadar jendernya dan sensitivitasnya meningkat serta memahami potensi-potensi wanita. Profil tersebut juga akan menunjukkan bahwa kalau ada kesenjangan jender bukan disebabkan karena kodrat dan kondisi normatif perempuan melainkan karena masyarakat masih membedakan secara tidak adil.

(2) Hasil

Teknik kegiatan sehari-hari, menghasilkan jadwal kegiatan harian dengan contoh sebagai berikut:



Contoh:  
**JADWAL AKTIVITAS HARIAN**  
**PETA NI SALAK PONDOH PEREMPUAN**



**KETERANGAN WARNA:**

- Pink : Sholat subuh
- Merah : aktivitas rumah tangga (memasak, cuci piring, pakian, membersihkan rumah, kandang temak)
- Biru : Aktivitas di Kebun Salak (penyiangan, pemupukan, pembuahan, panen).
- Hijau : Istirahat, sholat, makan

**2. FGD (Focus Group Discussion).**

FGD adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan media diskusi kelompok. Dalam diskusi tersebut topik pembicaraan difokuskan kepada hal-hal yang ingin diketahui data dan informasinya dari masyarakat. Peserta FGD adalah para informan yakni orang yang dianggap paling mengetahui persoalan yang sedang diteliti/dikaji. Sangat dianjurkan, peserta FGD dapat mewakili/mencerminkan kesetaraan jender di masyarakat. Dalam FGD dapat dipandu oleh seorang pemandu atau lebih dari seorang. Teknik ini memiliki kelebihan berupa data yang dikumpulkan lebih bersifat akurat (valid) oleh karena keterangan yang diperoleh satu orang dapat dikuatkan/didukung oleh beberapa orang informan sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih obyektif. Dengan

kata lain dalam FGD dapat diklarifikasi beberapa keterangan yang masih dianggap meragukan kebenarannya.

### **3. Wawancara mendalam (*indepth interview*)**

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Orang yang diwawancarai hendaklah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang persoalan yang sedang diteliti/dikaji, sehingga data yang diperolehpun akan menjadi lebih akurat/valid. Untuk menjamin validitas data yang diperoleh, sebaiknya teknik ini dilengkapi dengan teknik uji validitas data, diantaranya perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, kecukupan referensi dan sebagainya.

## BAB 6

# INDIKATOR RESPONSIF JENDER

### A. Pengertian

Secara umum, indikator adalah variabel yang digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui sesuatu baik dalam kondisi statik maupun dinamik. Dalam kondisi dinamik indikator merupakan ukuran obyektif untuk melihat perubahan, atau hasil-hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, atau suatu output dari kegiatan. Indikator memberikan suatu standar untuk mengukur, menilai atau menunjukkan kemajuan. Dengan demikian, indikator jender sensitif adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan ada/tidaknya ketidaksetaraan (*inequality*) antara laki-laki dan perempuan

Indikator sensitive dapat dilihat baik melalui indikator-indikator kesenjangan (*gap indicators*) maupun indikator subyek (*subject indicators*).

#### a. Indikator Kesenjangan

Indikator kesenjangan adalah variabel-variabel yang menunjukkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam status sosial ekonomi, misalnya:

- ◆ Kesenjangan dalam angka partisipasi sekolah.
- ◆ Kesenjangan dalam pendapatan
- ◆ Kesenjangan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan

b. Indikator Subyek

Indikator subyek adalah variabel-variabel yang menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti:

- ◆ Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga
- ◆ Prevalensi tindak kekerasan pada perempuan
- ◆ Sikap terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah/melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

## B. Jenis-jenis Indikator

### 1. Menurut Sifat Penilaian, indikator dapat dibagi menjadi dua yakni:

#### a. Kuantitatif

Adalah indikator yang cara pengumpulannya tidak tergantung dari penilaian subyektif dari orang yang mengumpulkan data. Indikator ini juga sering disebut sebagai indikator obyektif. Contoh indikator kuantitatif seperti rasio melek huruf laki-laki dan perempuan, tingkat partisipasi sekolah (laki-laki perempuan), angka kematian ibu, angka kematian bayi dan sebagainya.

#### b. Kualitatif

Didefinisikan sebagai uraian mengenai pandangan dan penilaian sekelompok orang tentang suatu subyek yang spesifik. Indikator kualitatif dapat diinterpretasikan dengan cara-cara formal, misalnya kesadaran jender "tinggi-rendah", kebiasaan "baik-buruk", tetapi dapat pula dengan cara mendeskripsikan misalnya, mengapa angka *drop-out* anak perempuan lebih tinggi dari anak laki-laki selama dua tahun masa krisis.

Sesuai dengan tujuannya, yaitu analisis deskriptif, maka sifat dari indikator kualitatif adalah lebih pada uraian ketimbang angka. Uraian ini sebagai jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana yang mengacu pada suatu indikator kuantitatif. Akan tetapi justru karena itulah, indikator kualitatif sering "dituduh" subyektif. Karena jawaban untuk

pertanyaan mengapa dan bagaimana, berkecenderungan untuk dijawab secara subyektif.

**Contoh indikator kualitatif:**

- **Indikator input:** indikator kuantitatif yakni 12% alokasi dana diperuntukkan bagi sektor pendidikan, maka indikator kualitatifnya adalah uraian pemanfaatan dana tersebut. Untuk dapat menguraikan indikator pemanfaatan dana itu, maka sejumlah pertanyaan untuk indikator kualitatif perlu diajukan antara lain bagaimana perincian alokasi dana tersebut (prioritas sekolah desa-kota, Jawa-luar Jawa, untuk rehabilitasi gedung, untuk seragam guru, perpustakaan, dan sebagainya).
- **Indikator proses:** adalah indikator untuk mengukur aktivitas yang sedang berlangsung. Misalnya indikator kuantitatif yaitu 50,4% angka partisipasi sekolah anak laki-laki usia 16-18 tahun dan 48,03% angka partisipasi sekolah anak perempuan usia 16-18 tahun, dan indikator kualitatifnya adalah uraian mengapa angka partisipasi siswa perempuan menurun pada tingkat sekolah yang lebih tinggi dan bagaimana usaha menyatakannya.
- **Indikator output:** adalah indikator yang mengukur hasil awal suatu kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan. Misalnya indikator kuantitatif yaitu 79% perempuan melek huruf (1990), meningkat menjadi 85% (1995), tetapi masih tertinggal dari laki-laki 90% (1990) dan 93% (1995). Indikator kualitatifnya adalah uraian mengapa kenaikan angka melek huruf perempuan lebih tinggi dari laki-laki dalam kurun waktu lima tahun.
- **Indikator dampak,** adalah indikator yang mengukur hasil dari suatu intervensi (program, proyek) setelah kegiatan selesai (dalam jangka panjang). Misalnya, indikator kuantitatif adalah pola ketenagakerjaan differensial yang terjadi karena pendidikan. Indikator kualitatifnya adalah uraian mengapa pola ketenagakerjaan berbeda antara propinsi A dan B meskipun tingkat pendidikan tidak terlalu berbeda jauh, mengapa



pola ketenagakerjaan antara laki-laki dan perempuan berbeda meskipun jenis pendidikannya sama.

## **2. Menurut Tahapan Kegiatan, Indikator dapat dibagi menjadi:**

### **a. Indikator Input**

Menunjukkan kontribusi awal seperti dana awal yang dialokasikan untuk sektor pertanian, misalnya 15% dari anggaran belanja negara untuk sektor pertanian.

### **b. Indikator Proses**

Adalah indikator yang menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung, seperti angka kematian bayi 40 per 1000 kelahiran, angka putus sekolah tingkat SD/MI di kabupaten A adalah 1,3% dsb.

### **c. Indikator Output**

Adalah indikator yang mengukur hasil kegiatan/program. Misalnya setelah 3 tahun program dijalankan, angka melek huruf di kabupaten A menjadi 95% (dari semula sebesar 90%).

### **d. Indikator Dampak**

Pengukuran hasil kegiatan program (kegiatan) secara menyeluruh dalam jangka panjang, misalnya angka partisipasi angkatan kerja.

## **C. Prinsip Penyusunan Indikator Responsif Jender**

Meskipun tidak ada prosedur standar yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi indikator, ada empat pertimbangan yang digunakan dalam menyusun indikator jender di masing-masing sektor, yakni:

**1. Relevan**, indikator tersebut betul-betul berguna untuk penilaian pelaksanaan dan keberhasilan program.

2. **Valid/sahih**, indikator tersebut benar-benar dapat dipakai untuk mengukur konsep atau variabel yang akan diukur.
3. **Dapat diukur**, ada data dan tersedia instrumen untuk mengukur.
4. **Ada sistem** untuk mengukur indikator tersebut.

Bahan masukan utama untuk menyusun indikator adalah kebutuhan atau masalah jender yang dihasilkan dari kegiatan analisis jender. Penyusunan indikator jender dilakukan melalui penelaahan masalah berikut sumberdaya dan alternatif pemecahannya terhadap kondisi harapan yang akan diwujudkan. Hal utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan indikator dari setiap aspek atau komponen adalah rasionalitas dari daya dukung potensi sumberdaya lokal institusi yang ada atau yang mungkin diadakan dari luar institusi untuk mewujudkan kondisi harapannya. Dengan kata lain rumusan indikator harus logis dan rasional dengan daya dukung potensi sumberdayanya. Hasil penyusunan indikator dapat diformulasikan melalui alternatif matriks berikut:

### Matriks Analisis Pengembangan Indikator Jender

Sasaran	Masalah	Potensi Sumberdaya		Indikator
		Tersedia	Diusahakan	
Diisi dengan sasaran yang telah diidentifikasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan/program/proyek/keg.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebiasaan.</li> <li>2. Program.</li> <li>3. Proyek/kegiatan</li> </ol> </li> <li>b. Kelompok Sasaran               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat khalayak program</li> <li>2. Aparat/personil</li> </ol> </li> </ol>	Diisi dengan masalah dari setiap sasaran yang telah diidentifikasi dalam kolom bentuk kesenjangan, berdasarkan faktor kesesuaiannya	Diisi dengan jenis/bentuk potensi dan/atau sumberdaya yang telah tersedia dan siap didayagunakan, sesuai dengan masalahnya	Diisi dengan jenis/bentuk potensi dan/atau sumberdaya yang perlu diusahakan dari luar, sesuai dengan masalahnya	Diisi dengan formulasi indikator dan setiap masalah

Penyusunan indikator responsif jender merupakan langkah terakhir dari alur kerja analisis jender. Dalam penyusunan indikator ini, hal yang utama dilakukan adalah mengidentifikasi lingkup indikator yang sensitif jender dari setiap kebijakan, program atau kegiatan yang dihasilkan dari langkah sebelumnya (langkah 5 : merumuskan tujuan/kebijakan atau program

yang baru yang responsif jender). Pertanyaan dasar berikut dapat membantu mengarahkan lingkup indikator yang sensitif jender.

- Indikator apa saja, baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat diidentifikasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan yang responsif jender?
- Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan sudah berkurang atau hilang?
- Apakah ukuran keberhasilan kesetaraan jender?

#### **D. Asumsi Yang Dipakai**

Pengembangan indikator jender sebagai alat untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan yang responsif jender didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut:

##### **a. Program pembangunan yang umum atau netral tetapi sebenarnya bias**

Dalam pembangunan sektor, tujuan dan sasaran yang ingin ditingkatkan umumnya netral, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan dan manfaat yang dapat diambil oleh masing-masing kelompok penduduk yang dirinci menurut umur, status sosial ekonomi, daerah dan jender. Dikatakan demikian, karena pemerintah hanya membuat satu jenis program untuk semua orang, padahal dasar berpihak atau kemajuan awal dari masing-masing kelompok berbeda. Sebagai contoh, pembangunan Pulau Jawa sudah jauh lebih maju dibandingkan luar Jawa. Netral terhadap jender diartikan sebagai program yang ditujukan untuk semua penduduk, tidak khusus untuk perempuan saja ataupun untuk laki-laki saja, padahal kemajuan yang telah dicapai pada saat program itu dibuat tidak sama, perempuan umumnya masih jauh tertinggal dari laki-laki.

Meski demikian ada juga beberapa program pembangunan yang responsif jender, atau bias jender namun seolah-olah menguntungkan perempuan. Bias jender yang ditemukan dalam Repelita VI umumnya berkaitan dengan program peningkatan peran perempuan, yang umumnya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan perempuan.

#### **b. Masih terdapat bias menurut jenis kelamin**

Dari nilai indikator yang diformulasikan dari tujuan dan sasaran program pembangunan yang netral gender tersebut akan dapat dilihat bahwa dampak program pembangunan semacam ini belum tentu sama terhadap perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu nilai indikator yang diformulasikan dari tujuan dan sasaran program pembangunan ini akan menjadi pembuka mata/wawasan dan diharapkan dapat menyadarkan para perencana akan manfaat program pembangunan terhadap kelompok penduduk perempuan dan laki-laki. Fakta menunjukkan bahwa program pembangunan umum yang netral gender sesungguhnya bias dan secara tidak disadari berpihak kepada laki-laki dalam hal akses terhadap pembangunan, partisipasi pembangunan, kontrol terhadap pembangunan, dan manfaat dari pembangunan.

#### **c. Masih terdapat kesenjangan gender**

Adanya kesenjangan gender yang dimaksud di sini adalah status dan kondisi perempuan dan laki-laki yang masih berbeda pada awal dilaksanakannya pembangunan sehingga dapat membuat perbedaan dampak pembangunan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat diantara mereka. Kesenjangan gender ini dapat diidentifikasi dari perbedaan nilai indikator baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator ini dapat mengukur berbagai kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

#### **d. Dapat disusun analisis gender**

Banyak program pembangunan yang tidak menyangkut sumberdaya manusia atau kalaupun terkait dengan penduduk perempuan laki-laki, tidak ada isu gender yang berarti dalam bidang program pembangunan tertentu. Oleh karena itu, salah satu asumsi yang dibuat adalah dapat dilakukannya analisis gender untuk mengetahui perbedaan dampak pembangunan itu. Dengan analisis gender ini diharapkan dapat diformulasikan suatu perencanaan pembangunan yang responsif gender.

**e. Tersedia data untuk mengukur kesenjangan jender**

Sumber data baik kuantitatif maupun kualitatif perlu diidentifikasi agar dapat diukur adanya kesenjangan jender di berbagai aspek kehidupan. Dari sumber data tersebut kemudian disusun statistik dan indikator yang dirinci menurut jenis kelamin maupun indikator jender. Indikator jender adalah sekumpulan indikator yang secara menyeluruh dapat menggambarkan adanya kesenjangan jender. Proses seleksi terhadap sumber data ini antara lain adalah keterwakilan (*representativeness*), keakuratan dan hasil terkini.

**• Adanya intervensi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan**

Kesenjangan jender diharapkan dapat dipersempit atau dihilangkan bila intervensi dapat dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jenis intervensi yang dapat dilakukan antara lain dapat berbentuk: kebijakan yang ditujukan khusus untuk perempuan agar mampu mengejar ketertinggalannya, peraturan perundang-undangan, serta program-program pembangunan. Disamping itu juga dapat berbentuk perencanaan yang responsif jender serta perumusan kembali kebijakan umum, peraturan perundang-undangan dan program pembangunan.

**• Adanya kemauan dan kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi**

Pengurangan dan penghapusan kesenjangan jender dapat dilakukan apabila tersedia data statistik yang dapat menjadi bahan penyusunan indikator jender. Di samping itu tentu saja intervensi itu dapat dilakukan apabila ada keamanan dan kemampuan dari pemerintah. Dengan pemantauan dan evaluasi sebuah program akan diketahui telah sesuai dengan rencana atau tidak, sehingga jika diperlukan, dapat segera dilakukan reformulasi program.

## E. Contoh Indikator Responsif Jender

Indikator umum adalah indikator yang netral, tidak memandang baik perempuan maupun laki-laki. Sementara itu, seperti telah dijelaskan di atas bahwa indikator dapat dihitung dari kelompok perempuan dan laki-laki dan indikator yang dirinci menurut jenis kelamin ini biasa disebut dengan indikator yang di"jender"kan. Indikator lain yang didasarkan pada indikator yang dirinci menurut jenis kelamin adalah indikator jender. Indikator ini disebut indikator jender karena dia dapat menunjukkan situasi atau keadaan yang sensitif jender.

Johnson (dalam Beck, 1999) menyebutkan bahwa indikator yang sensitif jender adalah indikator yang dapat menyajikan secara langsung perbedaan relatif status perempuan terhadap suatu angka normatif atau terhadap suatu kelompok tertentu. Indikator jender ini menunjukkan totalitas perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki yang disebabkan karena adanya kesenjangan hubungan perempuan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari berbagai upaya pembangunan (sumberdaya, informasi, pengetahuan dan lain-lain). Indikator jender ini tidak merupakan satu indikator tetapi satu set indikator (bisa dua indikator atau lebih tergantung permasalahannya).

### Indikator pendidikan

- Indikator umum : Angka partisipasi Sekolah (APS) anak usia 17-24 tahun di perguruan tinggi 12,10%
- Indikator yang di"jender"kan: APS anak perempuan (10,28%) dari APS laki-laki (14,15%).
- Untuk menentukan indikator jender kita perlu menggali lagi apa latar belakang yang mendasari besarnya angka partisipasi sekolah dari segi akses, partisipasi, kontrol, atau manfaat. Oleh karena itu satu set indikator yang harus disebutkan sebagai indikator jender adalah tidak hanya APS tetapi juga antara lain: minat melanjutkan sekolah, rata-rata jarak rumah ke sekolah, atau minat orangtua untuk menyekolahkan anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki di perguruan tinggi.

## Indikator Ketenagakerjaan

- Indikator Umum : rata-rata upah kerja (RUK) di sektor industri Rp 228.000.
- Indikator yang di"jender"kan: RUK perempuan (Rp 161.000) dan RUK laki-laki (Rp 268.000)
- Yang perlu digali untuk menentukan indikator jender adalah adakah faktor-faktor yang mempengaruhi upah kerja perempuan yang terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, atau manfaat. Satu perangkat indikator untuk menunjukkan indikator jender bidang ketenagakerjaan dapat dibentuk selain dari RUK, rata-rata jam mengerjakan pekerjaan domestik, pendidikan pekerja, dan rata-rata lama perjalanan dari rumah ke tempat pekerjaan dari penduduk perempuan dibandingkan laki-laki.

## Indikator Pengambilan Keputusan

- Indikator umum: pegawai negeri yang menjabat eselon II (1,63%)
- Indikator yang di"jender"kan: pegawai negeri yang menjabat eselon II menurut jenis kelamin (perempuan = 0,68%, dan laki-laki = 1,77%).
- Peran perempuan di bidang pengambilan keputusan tidak dapat secara utuh hanya digambarkan. Untuk memperoleh indikator jender kita perlu melengkapinya dengan informasi tentang proses pemilihan pejabat, komposisi pegawai laki-laki dan perempuan, keaktifan perempuan dan prestasi perempuan di eselon II.

Contoh:  
Formulasi indikator yang dijabarkan pada sektor

Kategori	MASALAH JENDER	TUJUAN JENDER	INDIKATOR YANG
<b>A</b> <b>SEKTOR SOSIAL</b> Peranganan anak jalanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak laki-laki lebih dibebani pe-ran sosial untuk menjadi tulang punggung ekonomi keluarga</li> <li>2. Anak laki-laki lebih berkemampuan menikmati pendidikan, pembinaan dan pelaya-ran sosial yang tersedia</li> <li>3. Laki-laki lebih dominan dalam pengetahuan dan penyeleng-garaan pelayanan</li> <li>4. Sarana pelayanan dan petugas, baik di rumah singgah/program kestrampilan, lebih mengutamakan anak laki-laki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pembinaan anak jalanan yang lebih jender responsif</li> <li>2. Anak laki-laki dan perempuan memiliki kesadaran terhadap kesetaraan tanggungjawab untuk bersama-sama membantu orang tua</li> <li>3. Memberikan kesempatan yang sama untuk anak perempuan dalam menikmati pendidikan, pembinaan, pelayanan sosial dan fasilitas yang tersedia</li> <li>4. Menyatakan kualitas dan kuantitas laki-laki dan perempuan dalam mengedala dan menyeleng-garakan pelayanan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya perencanaan pembinaan anak jalanan yang jender responsif.</li> <li>2. Anak laki-laki dan perempuan sadar bahwa membantu orangtua adalah tanggungjawab bersama</li> <li>3. Anak perempuan berkemampuan sama dalam menikmati pendidikan, pembinaan, pelayanan sosial dan fasilitas yang tersedia.</li> <li>4. Kesetaraan kualitas dan kuantitas laki-laki dan perempuan pengedala dan penyelenggara pelayanan sosial.</li> <li>5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan perempuan.</li> </ol>



1	2	3	4
<p>B. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Meningkatkan sum-berdaya manusia &amp; kemampuan aparatur pemerintah serta masyarakat dalam pengelolaan LH</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pelatihan pengelolaan lingkungan hidup lebih rendah dari laki-laki.</li> <li>2. Peran serta perempuan dalam penentuan peserta pelatihan pengelolaan lingkungan hidup rendah.</li> <li>3. Masalah pengelolaan lingkungan hidup diasumsikan dapat diselesaikan hanya dengan intervensi teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian dalam penentuan prasyarat peserta pelatihan.</li> <li>2. Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan jender dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>3. Diseminasi informasi pelatihan pengelolaan lingkungan hidup tepat sasaran dan waktu.</li> <li>4. Penetapan sistem kuota terhadap peserta perempuan dalam pelatihan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>5. Informasi tentang pelatihan untuk mengurangi beban kerja perempuan dan aktrab lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 40% perempuan dalam pelatihan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>2. Adanya peraturan pemerintah pada sektor terkait tentang kuota peserta perempuan dalam pelatihan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>3. Adanya kurikulum pendidikan pengelolaan LH yang jender sensitif.</li> <li>4. Adanya diseminasi tentang teknologi tepat guna untuk mengurangi beban kerja perempuan.</li> <li>5. Persentase perempuan 60% dan laki-laki 40% dalam menentukan penyuluhan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan.</li> </ol>

Formulasi indikator yang dijabarkan pada sektor (Lanjutan)

	2	3	4
<p><b>C</b> SEKTOR KESEHATAN</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menurunkan angka kematian ibu menjadi 225 per 100.000 kelahiran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perempuan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan.</li> <li>2. Perempuan tidak punya kewenangan dalam mengambil keputusan untuk mencegah kehamilan</li> <li>3. Ketersediaan pelayanan kesehatan profesional masih kurang.</li> <li>4. Sistem rujukan tidak berjalan</li> <li>5. Kemtraan dukun dan tenaga kesehatan kurang dibina.</li> <li>6. Sosial budaya masyarakat tidak mendukung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengetahuan laki-laki tentang reproduksi sehat.</li> <li>2. Meningkatkan peran serta laki-laki dalam reproduksi sehat.</li> <li>3. Peningkatan peran serta orang tua/mentua dalam reproduksi sehat.</li> <li>4. Peningkatan peran serta tokoh masyarakat/tokoh agama dalam reproduksi sehat.</li> <li>5. Peningkatan peran serta dukun dan pengobatan tradisional (bakra) dalam reproduksi sehat.</li> <li>6. Peningkatan <i>campaign</i> mengenai mutu pelayanan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perempuan mingkal dalam pengetahuan tentang reproduksi sehat</li> <li>2. Persentase perempuan mingkal dalam peran serta program reproduksi sehat</li> <li>3. Persentase orang tua, dukun mingkal dalam pengetahuan dan peran serta tentang reproduksi sehat.</li> </ol>

1	2	3	4
<p>D. SEKTOR DALAM NEGERI Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah Kab./kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan perempuan rendah.</li> <li>Pengalaman kerja perempuan lebih rendah.</li> <li>Promosi perempuan lebih rendah.</li> <li><i>Discriminatory practices.</i></li> <li>Akses pendidikan perempuan rendah</li> </ol>	<p>1. <i>Develop infrastructure.</i> Perbaikan sistem rekrutmen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan nilai budaya</li> <li><i>Relevant/flexible/more choice in term of course.</i></li> <li>Kurikulum pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator jender untuk 5 tahun.</li> <li>Semakin banyak universitas yang disamakan.</li> <li>Fakultas yang sesuai dengan kebutuhan daerah.</li> <li>Bea siswa meningkat 10% untuk perempuan.</li> <li>Persentase PNS perempuan golongan Ma Mb menjadi 45%.</li> <li>Persentase PNS perempuan golongan N meningkat</li> <li>Peningkatan pendapatan asli daerah</li> </ol>
<p>E. SEKTOR PARIWISATA Mengembangkan pariwisata nusantara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laki-laki sebagai kepala rumah-tangga dapat bekerja dan mempunyai kesempatan serta kemampuan.</li> <li>Sarana transportasi belum nyaman dan belum aman bagi perempuan</li> </ol>	<p>Mensetarakan laki-laki dan perempuan untuk mempunyai kesempatan dan kemampuan berwisata dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan kesempatan berusaha laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% perempuan kepala rumah-tangga memiliki usaha/pekerjaan.</li> <li>Komposisi wisatawan perempuan:laki-laki mencapai 40:60</li> <li>Peningkatan jumlah wisatawan domestik/ nusantara sebesar rata-rata 10%/th.</li> </ol>

**Contoh:**  
 Formulasi indikator yang dijabarkan pada sektor (*Langkahan*)

1	2	3	4
	3. Perempuan tidak mempunyai pendapatan sendiri serta sulit untuk berwisata sendiri.	2. Mengembangkan sarana, obyek dan daya tarik wisata yang memenuhi minat laki-laki dan perempuan untuk berwisata. 3. Meningkatkan pembinaan masyarakat bahwa pariwisata adalah salahsatu kebutuhan hidup keluarga (laki-laki & perempuan).	

Penyusunan Indikator Responsif Jender

SISWA	MASALAH JENDER	POTENSI SUMBERDAYA		INDIKATOR
		TERSEDIA	DIUSAHAKAN	
16 kecamatan (180 desa). Tiap desa diambil 5 orang perempuan yang dianggap potensial	Peran serta perempuan dalam kepemimpinan parpol lokal masih rendah	Dana (Rp .....)	Kerjasama dengan lembaga lain seperti LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan sebagainya	Peran serta perempuan dalam kepemimpinan parpol lokal (meningkat menjadi 10%)
	Peran serta perempuan dalam lembaga legislatif lokal masih rendah	Program (pelatihan, magang dsb.)	Dukungan masyarakat (perkiraan sebesar-besarnya dukungan masyarakat terhadap program tsb.)	Peran serta perempuan dalam lembaga legislatif lokal (meningkat menjadi 20%)
	Peran serta perempuan dalam kepemimpinan lembaga lokal masih rendah	SDM untuk melaksanakan program tersebut (... Orang) dapat pula diperinci menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dsb.		Peran serta perempuan dalam kepemimpinan lembaga lokal (meningkat menjadi 10%)
	Nilai sosial budaya yang kurang mendukung peran perempuan dalam dunia politik	Fasilitas yang tersedia (sebutkan gedung, kendaraan, media pembelajaran dsb.)		Terjadi perubahan nilai sosial budaya dalam kaitannya dengan peran politik perempuan

**Contoh:**  
 Cara Merubah Indikator menjadi indikator Responsif Jender

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR LAMA	INDIKATOR RESPONSIF JENDER
1	2	3
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring Tersusunnya bahan evaluasi Terselenggaranya Rakor Evaluasi Pelaksanaan	Pelaksanaan monitoring melibatkan ...% perempuan. Bahan evaluasi dan instrumen monitoring responsif jender *) • ... % perempuan peserta rakor evaluasi pelaksanaan • ... % laki-laki peserta rakor evaluasi pelaksanaan • ... % perempuan peserta rakor evaluasi pelaksanaan aktif dalam pengambilan keputusan • ... % laki-laki peserta rakor evaluasi pelaksanaan aktif dalam pengambilan keputusan
	Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan program/proyek 2003	Laporan evaluasi pelaksanaan program/proyek 2003
Asistensi Program Pembangunan	Dokumen usulan Terselenggaranya asistensi	• ... % usulan program responsif jender *) • ... % perempuan penyusun program • ... % laki-laki penyusun program • ... kali asistensi yang masing-masing diikuti oleh ...% peserta perempuan, dan ... % laki-laki
Pelatihan Manajemen Pengelolaan UKM	Terselenggaranya pelatihan manajemen pengelolaan UKM	• ... kali pelatihan manajemen pengelolaan UKM • ... % perempuan peserta pelatihan manajemen pengelolaan UKM • ... % laki-laki peserta pelatihan manajemen pengelolaan UKM

**Contoh:**  
 Cara Merubah Indikator menjadi indikator Responsif Jender (Lanjutan)

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR-JEMAH	INDIKATOR RESPONSIF JENDER
Bimbingan UDKP	2 Terselenggaranya diskusi UDKP	3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ... diskusi UDKP</li> <li>• ... % perempuan peserta diskusi UDKP</li> <li>• ... % laki-laki peserta diskusi UDKP</li> <li>• ... % perempuan (dan laki-laki) aktif dalam diskusi</li> <li>• ... % usulan program responsif jender</li> </ul>

**Keterangan:**

- : bahan dan instrumen money yang responsif jender adalah bahan dan instrumen yang telah memperhitungkan (mengakomodasi) laki-laki dan perempuan baik dalam akses, peran, kontrol dan manfaat dari keseluruhan proses pembangunan.
- : usulan program responsif jender adalah usulan program yang telah memenuhi beberapa persyaratan, seperti misalnya data terpilah jender, indikator responsif jender, proses penyusunan yang melibatkan perempuan dan sebagainya.

**Contoh:**  
Penyusunan Matrik Indikator Responsif Jender

BIDANG/SEKTOR	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	BASELINE DATA				Ketersangan Jender	
			L	P	L+P	Sumber data		
Pembangunan Hutan Tanaman Baru	Tujuan: Untuk meningkatkan potensi hutan tanaman yang dibangun di dalam kawasan hutan produksi	Sasaran: • Untuk meningkatkan produksi hasil hutan • Untuk meningkatkan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan hutan	% tenaga kerja usaha HTI	82,72	17,28	100	BPS Statistik Persh. HTI '95	SR=4,79
			%pekerja HTI supervisor +	13,46	2,69	10,99	BPS ST '93	BP=12,95
			% pekerja HTI SLTA+	50,67	37,72	48,43	BPS Statistik Persh. HTI '95	BP=12,95
			% tenaga kerja perusahaan pembudidayaan tanaman kehutanan tamat SMA+	45,70	42,19	45,21	BPS Statistik Persh. HTI '95	BP=3,51



Contoh:  
Penyusunan Matrik Indikator Responsif Jender (Lanjutan)

	2	3	4	5	6	7	8	
Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah	Sasaran: • Bertambahnya jumlah industri rumah tangga yang dapat memasuki golongan industri kecil, meningkatkan jumlah industri kecil menjadi industri menengah, serta bertambahnya jumlah industri menengah yang tangguh dan efisien. • Meningkatkan skala penjualan dan tumbuhnya wirausaha baru industri kecil dan menengah.	% pengusaha industri kerajinan rt	56,82	43,18	100	BPS Survei IKKR 91	SR=1,32	
		% tenaga kerja industri kerajinan rt	56,70	43,30	100	Idem		SR=1,31
		% tenaga kerja industri besar/ sedang	53,29	46,71	100		BPS Survei industri B/S 96	SR=1,14
		% pengusaha industri kecil menurut jenis input					Deperindag	
		% pengusaha industri menengah menurut output					Idem	
		% pengusaha industri	53,92	46,03	100		BPS Supas 1995	SR=1,17
		% tenaga industri	19,88	26,26	21,87		BPS Sakernas 1997	BP=6,38

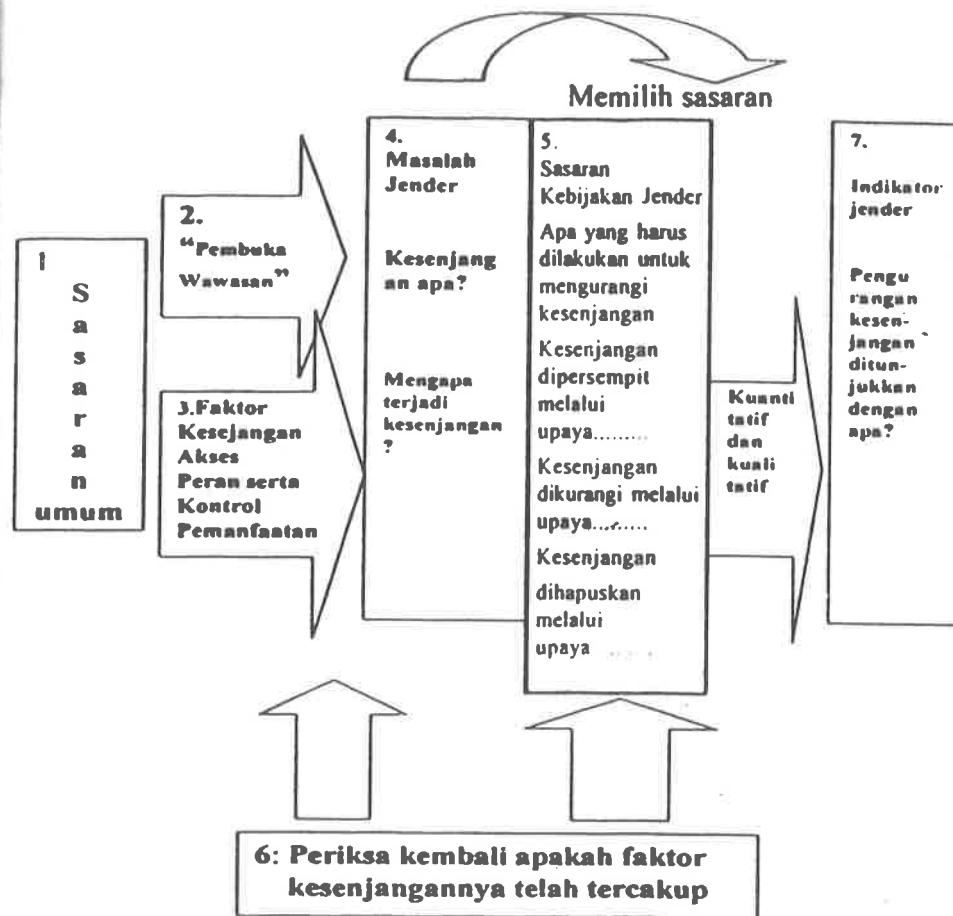
## **BAB 7**

# **APLIKASI GENDER ANALYSIS PATHWAY**

### **A. Pengertian**

*Gender Analysis Pathway (GAP)* pada dasarnya memberikan kerangka atau Alur Kerja Analisis Gender (AKAJ) dalam melakukan identifikasi masalah gender pada kebijakan dan program atau kegiatan yang telah ada. AKAJ adalah alat yang dapat digunakan untuk "mengarustamakan gender" dalam perencanaan kebijakan, program atau kegiatan sektor. Berdasarkan alur kerja ini akan dihasilkan rangkaian sebab akibat dari masalah yang muncul secara sistematis dan sistematis, sehingga akan memudahkan dalam merancang kegiatan pemecahan masalahnya.

## B. Alur Kerja Analisis Jender



Berdasarkan Alur Kerja Analisis Jender (AKAJ) di atas, berikut ini rincian dari langkah-langkah tersebut:

### Langkah 1

Menginventarisasi kebijakan, program atau kegiatan/proyek yang telah ada untuk dijadikan sasaran umum atau tujuan umum identifikasi isu jender. Pertanyaan dasar yang dapat diajukan pada langkah ini, antara lain

- ❖ Apa saja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan kedudukan perempuan?
- ❖ Apakah komitmen tersebut telah tercermin dalam kebijakan, program, kegiatan yang ada?
- ❖ Apakah formulasi kebijakan sudah secara jelas bahwa hasilnya ditujukan bagi manfaat keduanya, laki-laki dan perempuan?

**Sebagai contoh dalam sasaran umum diisi dengan “meningkatkan tingkat kelulusan sekolah menengah”.**

## **Langkah 2**

Menyajikan data kuantitatif dan kualitatif sebagai pembuka wawasan untuk:

- Mengungkapkan dampak yang berbeda dari kebijakan program/ kegiatan yang ada terhadap laki-laki dan perempuan, atau
- Menentukan perspektif/dimensi gender dari kebijakan, program/ kegiatan baru

Data ini harus dapat dibedakan menurut jenis kelamin, sehingga dapat memudahkan untuk memahami perbedaan dampak antara laki-laki dan perempuan untuk mengungkapkan hal tersebut, diajukan pertanyaan sebagai berikut:

- ❖ Apakah dari data tersebut mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara laki-laki dan perempuan?

Contoh: Dari data yang ada, yang menjadi data pembuka wawasan (kotak2) diperlihatkan bahwa siswa laki-laki yang tamat di atas SLTP (26,2%) lebih tinggi dari perempuan (18,4%).

## **Langkah 3**

Menganalisis mengenai sumber terjadinya kesenjangan tersebut pada langkah 2 muncul berdasarkan faktor-faktor kesenjangan gender. Apakah kesenjangan tersebut bersumber dari:

- perbedaan dalam kewenangan akses dan penguasaan terhadap sumberdaya
- kesempatan untuk berperan serta di dalam mengambil keputusan, atau
- perbedaan dalam manfaat.

Pertanyaan dasar berikut dapat membantu mengungkapkan hal tersebut:

- ❖ apakah laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan?
- ❖ siapa yang menguasai sumberdaya tersebut?
- ❖ bagaimana partisipasi laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan?
- ❖ apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan atau sumberdaya yang ada?

Contoh: Dari perspektif gender, ketimpangan ini ditemukan penyebabnya di empat dimensi: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

#### Langkah 4

Mengidentifikasi masalah-masalah gender berdasarkan empat faktor kesenjangan gender yang dihasilkan pada langkah 3. Pertanyaan dasar berikut dapat membantu mem-formulasikan masalah gender.

- ❖ masalah-masalah apa yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan tersebut?
- ❖ dimana terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki?
- ❖ mengapa terjadi kesenjangan tersebut?
- ❖ apakah kebijakan dan program yang ada justru memperlebar kesenjangan tersebut?
- ❖ apakah akar permasalahannya?
- ❖ bagaimana mengatasinya?

Contoh: Melalui analisis jender ini, ditemukan masalah/isu jender (kotak 4), kesenjangan itu termanifestasikan dalam:

- Lulusan murid perempuan lebih sedikit dari murid laki-laki
- Partisipasi murid perempuan lebih sedikit dari laki-laki di dalam program sekolah
- Murid perempuan lebih banyak berada di jurusan sosial
- Murid laki-laki lebih banyak di jurusan teknik.

Kesejangan tersebut disebabkan:

- Murid perempuan didorong untuk menikah dan meninggalkan sekolah.
- Murid perempuan tidak mempertimbangkan diri sebagai pencari nafkah utama

### Langkah 5

Merumuskan kembali sasaran umum dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis jender yang dilakukan, sehingga mendapatkan satu sasaran tujuan, kebijakan atau program yang baru, yang jender responsif.

Pertanyaan dasar berikut dapat membantu mengarahkan sasaran/tujuan kebijakan atau program yang sensitif jender?

- ❖ Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada?
- ❖ Alternatif kebijakan apa yang perlu diputuskan untuk mengatasi kesenjangan yang ada?
- ❖ Alternatif program atau kegiatan apa untuk memecahkan kesenjangan yang ada?
- ❖ Rumusan tujuan program atau kegiatan yang bagaimana yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan jender pada kelompok sasaran?

**Contoh:**

Sasaran umumnya setelah direformulasi (kotak5) menjadi: pengurangan kesenjangan rasio lulusan murid laki-laki dan perempuan dari 0,67 (1990) menjadi 0,84 (1998), melalui:

- Perbaiki materi pengajaran yang responsif gender
- Pemberian tambahan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi murid perempuan
- Program sekolah "ramah gender"
- Sosialisasi bahwa perempuan tidak harus cepat kawin.

**Langkah 6**

Mengidentifikasi lingkup indikator yang sensitif gender dari setiap kebijakan atau program atau kegiatan yang dihasilkan dari langkah 5. Pertanyaan dasar berikut dapat membantu mengarahkan lingkup indikator yang sensitif gender.

- ❖ Indikator apa saja, baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat diidentifikasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan yang responsif gender?
- ❖ Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan sudah berkurang atau hilang?
- ❖ Apakah ukuran keberhasilan kesetaraan gender?

**Langkah 7**

Dengan mengacu pada sasaran umum yang sudah responsif gender seperti tersebut di atas dan menemukan apa yang menjadi isu gender (masalah) gender, maka suatu indikator gender siap untuk dikembangkan (kotak 7). Indikator itu dapat berupa indikator kuantitatif dan/atau indikator kualitatif (lihat kotak diantara kotak 6 dan 7). Contoh indikator kuantitatif yang responsif gender dengan mengacu pada kasus di atas adalah: rasio lulusan murid perempuan dan laki-laki bertambah dari 0,67 pada tahun 1990 menjadi 0,84 pada tahun 1998, misalnya telah dicapai setelah adanya perbaikan sebagai berikut:

- ❖ 25% dari materi pengajaran sudah responsif jender.
- ❖ Kesenjangan murid perempuan /laki-laki di jurusan ilmu pengetahuan dan teknologi turun sebesar 25% pada tahun 1998.

#### **Indikator kualitatif yang responsif jender**

1. Melalui *content analysis* diuraikan mengenai materi/substansi buku-buku pengajaran untuk siswa (bisa dipilih buku periode tertentu, atau buku yang diperuntukkan murid tingkat tertentu), kemudian identifikasi bagian-bagian yang bias jender, Misalnya: "Ayah Budi pergi ke kantor, ibu Budi berbelanja ke pasar", "Laki-laki tidak boleh menangis seperti anak perempuan".
2. Melalui suatu analisis deskriptif: "dalam iima tahun terakhir partisipasi mahasiswi D3 jurusan mesin Universitas A turun dengan cukup berarti. Dari hasil studi terhadap mahasiswa, pengajar, pengelola pada jurusan diketahui, bahwa jurusan mesin dibuka sepuluh tahun yang lalu dan banyak menarik perempuan untuk masuk. Tidak ada diskriminasi antara mahasiswa dan mahasiswi dalam menerima dan mempraktekkan pelajarannya. Mahasiswi diharuskan masuk bengkel dan mengoperasikan mesin bubut, dan alat berat lain, seperti halnya dengan mahasiswa. Hampir semua mahasiswi menyelesaikan studinya. Dalam salah satu angkatan, 8 mahasiswi lulus semua. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mendapat pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sebagian besar mahasiswi yang lulus dan bekerja di kantor tidak selalu berkaitan dengan teknik melainkan sebagai karyawan administratif, satu orang bekerja di almameternya, juga sebagai karyawan administratif, dua orang menikah, dan satu yang menjadi ibu rumahtangga. Meskipun secara *de jure* tidak ada diskriminasi jender, akan tetapi secara *de facto* stereotype jender masih kental dirasakan.



### **C. Aplikasi *Gender Analisis Patway* dalam Rencana Program**

Aplikasi GAP pada dasarnya merupakan penyusunan rencana aksi yang responsif jender berdasarkan kebijakan/program/kegiatan yang telah atau sedang berlangsung. Rencana aksi yang responsif jender ini meliputi dua langkah yakni:

1. Penyusunan rencana aksi diisi dengan rincian kegiatan dan kebijakan yang baru dirumuskan.
2. Sasaran diisi dengan sasaran setipa kegiatan dalam rencana aksi secara kuantitatif atau kualitatif (untuk mengurangi kesenjangan jender).

Cara mengisi formulir (lembar kerja) 1 sampai 8 sebagai berikut:  
seperti formulir terlampir:

#### **1. Pada lembar kerja 1:**

Diisi dengan kebijakan program/proyek/kegiatan saat ini, kolom 2 pada tahun yang sedang berlangsung, pada kolom 3 diisi dengan tujuan umum dan kebijakan program/kegiatan/proyek, pada kolom 4 diisi dengan sasaran, dan kolom 5 diisi dengan indikator.

#### **2. Pada lembar kerja 2:**

Pada kolom 2 diisi data terpilah laki-laki dan perempuan dapat mengambil dari data makro (hasil sensus) dan dari data mikro (data profil statistik dan indikator jender propinsi Kabupaten/kota, atau data mikro sektor maupun organisasi). Pada kolom 3 ditulis secara jelas sumber data yang diambil. Pada kolom 4 ditulis bentuk data (kuantitatif atau kualitatif).

#### **3. Pada lembar kerja 3**

Pada kolom 2 dituliskan kebijakan/program/kegiatan yang selanjutnya dilihat dari aspek: akses, peran, kontrol, dan manfaat dengan memberi tanda pada keterangan yang tertulis pada lembar kerja. Pada lembar kerja 3a (analisis kesenjangan jender).

Pada kolom 2 diisi dengan kegiatan/program/proyek yang dilihat dari faktor kesenjangan dari aspek: akses, peran, kontrol dan manfaat (kolom 3,4,5, dan 6) serta kesenjangan nya ditulis secara narasi.

**4. Pada lembar kerja 4 (Analisis Isu Jender)**

Pada kolom 2 ditulis masalah kesenjangan jender dilihat dari faktor penyebab agama, ekonomi, dan lain-lain (kolom 3,4,5, dan 6).

Pada kolom 7 diisi klasifikasi kesenjangan dan kolom 8 diisi isu jender dengan menuliskan narasi.

**5. Lembar kerja 5 (Formulasi Kebijakan Baru)**

Pada kolom 2 diisi isu gender dan kolom 3 diisi reformulasi kebijakan program/proyek dan kolom 4 diisi dengan rincian kegiatan.

**6. Lembar Kerja 6 (Identifikasi Indikator Jender)**

Pada kolom 2 dan 3 diisi kebijakan/program/kegiatan lama dan baru.

Pada kolom 4 tujuan (4 dan 5) ditulis tujuan lama dan baru. Pada kolom 6 dan 7 ditulis indikator lama dan baru.

**7. Lembar Kerja 7 (Penyusunan Rencana Aksi)**

Pada kolom 2 ditulis program/kegiatan. Pada kolom 3 ditulis tujuan (tujuan yang baru). Pada kolom 4 pelaksanaan ditulis instansi/sektor terkait atau mitra kerja. Pada kolom 5 ditulis waktu pelaksanaan (bulan, tahun). Pada kolom 6 ditulis tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan.

**8. Lembar Kerja 8**

Pada lembar kerja ini merupakan rekapitan dari lembar kerja 1 sampai dengan 7 yang meliputi:

- a. Pada kolom 2 diisi kebijakan Program/Proyek/Kegiatan (diambil dari LK 1 kolom2).
- b. Pada kolom 3 ditulis data pembuka wawasan dengan data terpilah laki-laki dan perempuan (diambil dari LK 2 kolom 2).
- c. Pada kolom 4 ditulis tentang masalah kesenjangan (diambil dari LK 3a kolom 2).
- d. Pada kolom 5 diisi isu jender (diambil dari LK 4 kolom 8).

- e. Pada kolom 6 diisi reformulasi kebijakan/program/proyek/kegiatan (diambil dari LK 5 kolom 3 dan 4).
- f. Pada kolom 8, kegiatan diisi dengan rincian kegiatan (diambil dari LK 7 kolom 2). Pada kolom 9 sasaran diisi dengan sasaran kegiatan (siapa sasarannya).

Contoh:  
Penulisan Formulir Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)

**IDENTIFIKASI KEBIJAKAN/PROGRAM/PROGRAM/PROYEK/KEGIATAN (K/P/P/K)  
PROPENAS/RENSTRA/REPETAREPETADA (P/R/R/R)**

LK-1

NO.	KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK/REPEK/REPETA	TUJUAN-ALUM	SASARAN	IMPAK
	Kebijakan: Pemantauan perkembangan usaha koperasi dan UKM  Program: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian pola kemitraan dan usaha koperasi</li> <li>• Peningkatan SDM koperasi</li> <li>• Fasilitas Modal koperasi</li> </ul> Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temu usaha koperasi dengan Badan Usaha lain</li> <li>• Pelatihan pengurus, pengelola dan anggota koperasi</li> <li>• Magang bagi pengelola koperasi</li> <li>• Sosialisasi/penyuluhan perkoperasian kepada anggota koperasi dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan</li> <li>• Meningkatkan kemandirian koperasi</li> <li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 kecamatan di kabupaten A</li> <li>• 30 desa</li> <li>• 50 Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya sosialisasi "Kehidupan Berkoperasi"</li> <li>• Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi pengurus koperasi</li> <li>• Meningkatnya jumlah anggota koperasi</li> <li>• Meningkatnya struktur modal koperasi</li> </ul>

DATA KUANTITATIF ATAU KUALITATIF (TERPILIH)  
UNTUK PEMBUKA WAWASAN

LK-2

NO.	DATA	SUMBER DATA	BENTUK
1	Jumlah Koperasi di Kabupaten A	3 Dinas Koperasi Kabupaten A, BPS Kabupaten	4 Kuantitatif
2	Jumlah Koperasi di Kabupaten A berdasarkan Kinerja (Misalnya dibedakan : "aktif", "kurang aktif", "tidak aktif"	Dinas Koperasi Kabupaten A, BPS Kabupaten	Kuantitatif
3	Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten A (berdasarkan Jenis Kelamin) *	Dinas Koperasi Kabupaten A	Kuantitatif/Kualitatif
4	Jumlah Pengurus Koperasi di Kabupaten A Berdasarkan Jenis Kelamin **	Dinas Koperasi Kabupaten A	Kuantitatif/Kualitatif
5	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Manajemen Koperasi (Berdasarkan Jenis Kelamin) *	Dinas Koperasi Kabupaten A	Kuantitatif/Kualitatif
6	Jumlah penerima kredit/pinjaman koperasi Berdasarkan Jenis Kelamin	Dinas Koperasi Kabupaten A	Kuantitatif/kualitatif
7	Data lain yang dianggap perlu	Dinas Koperasi Kabupaten A, Sumber lain	

Keterangan:

- \* : Jika data terpilah jender kuantitatif tidak tersedia, maka dapat diupayakan tersedianya data terpilah jender kualitatif misalnya dengan cara mewancarai pihak yang berkompeten. Upaya ini dilakukan untuk memperkirakan perbandingan jumlah anggota koperasi laki-laki dan perempuan. Hasilnya misalnya dinumuskan sebagai berikut: Jumlah anggota koperasi laki-laki ( ) jumlah anggota koperasi perempuan. Hal yang sama juga diperoleh pada jumlah pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan manajemen.

Data ini dapat dikembangkan lagi misalnya menjadi jumlah pengurus koperasi berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, jumlah pengurus koperasi berdasarkan jenis kelamin dan kedudukan dalam koperasi, dsb. Data ini berguna untuk memperkirakan apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi dan kontrol serta manfaat yang setara dalam kepemimpinan koperasi.

Contoh:  
Penulisan Formulir Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)

ANALISIS KESEJUANGAN JENDER

No	PROGRAM/PROJEK/KEGIATAN	AKSES		PERAN		KONTROL		MANFAAT		KETERANGAN
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Program Pengembangan Kemitraan Berkoperasi	++	+/-	++	+/-	++	+/-	++	+/-	Diisi: (-) = Tidak ada (+/-) = Kecil (+) = Cukup (++) = Banyak (+++)= Banyak sekali (?) = Tidak tahu

LK-3

Keterangan:  
1. Pada dimensi Akses: laki-laki diberi lambang (++) dan perempuan (+/-). Hal ini disebabkan kondisi di kabupaten A menunjukkan bahwa program tersebut pada dasarnya memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi anggota koperasi. Atau dengan kata lain tidak ada satu pun aturan hukum yang melarang perempuan menjadi anggota koperasi. Akan tetapi perempuan masih menghadapi kendala budaya berupa sistem nilai yang menyatakan bahwa "menjadi anggota koperasi adalah urusan laki-laki/suami". Yang berhak mengurus kredit adalah suami/laki-laki" dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan akses perempuan menjadi anggota/pengurus koperasi menjadi rendah/kecil.

2. Pada dimensi Peran: Laki-laki diberi lambang (++) dan perempuan (+/-). Hal ini disebabkan pada kenyataannya di kabupaten A, jumlah anggota dan pengurus koperasi lebih didominasi oleh laki-laki.
3. Pada dimensi Kontrol: Laki-laki diberi lambang (++) dan perempuan (+/-). Berkaitan dengan peran laki-laki dalam keanggotaan dan kepengurusan koperasi, maka kontrol (penguasaan dan kebijakan) lebih banyak dipegang oleh laki-laki. Kepengurusan koperasi tidak hanya didominasi laki-laki melainkan juga pada posisi-posisi penting (strategis) dalam koperasi tersebut dipegang oleh laki-laki.
4. Pada dimensi Manfaat: Laki-laki diberi lambang (++) dan perempuan (+/-). Berkaitan dengan akses, peran, dan kontrol yang didominasi laki-laki maka manfaat yang diperolehpun lebih banyak dinikmati oleh laki-laki.

**Contoh:**

**Penulisan Formulir Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)**

**ANALISIS KESENIANGAN JENDER**

LK-3a

NO.	K/P/P/K	DIMENSI KESENIANGAN				KESENIANGAN
		AKSES	PERAN/ PARTISIPASI	KONTROL	MANFAAT	
1	2 Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi Kegiatan: • Sosialisasi Manfaat Berkoperasi. • Pelatihan manajemen koperasi • Bantuan modal koperasi • Dll.	3 Baik program maupun kegiatan sebetulnya tidak tertutup bagi perempuan. Namun demikian perempuan masih menghadapi kendala budaya berupa sistem nilai yang belum mendukung	4 Peran/partisi- pasi perempuan- an dalam ke- anggotaan/ kepengurusan koperasi ma- sih sangat rendah	5 Kontrol perempu- an dalam kebijak- an, program, dan kegiatan pertoke- rasian masih ren- dah karena belum terlibat di dalam- nya	6 Karena perempu- an belum terlibat dalam perkopera- sian, maka perem- puan belum ba- nyak merasakan manfaatnya	7 Adanya kesenjangan jender baik dalam pe- ran, kontrol dan man- faat yang diakibatkan perbedaan akses (bersumber pada nilai budaya).

**Keterangan:**

Pengisian formulir ini didasarkan pada formulir LK-3 yang telah diisi sebelumnya. Keterangan yang diisikan dalam kolom-kolom tersebut merupakan deskripsi dan penjelasan arti simbol (lambang) yang diisikan pada LK-3.

Contoh:  
Penulisan Formulir Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)

ANALISIS ISU JENDER

LK-4

NO.	MASALAH KESENIANGAN JENDER	FAKTOR PENYEBAB				KLASIFIKASI KESENIANGAN	ISU JENDER
		SOSIAL	AGAMA	EKONOMI	LAIN-LAIN		
1	Adanya kesenjangan dalam peran, kontrol dan manfaat dalam kebijakan program dan kegiatan perkerjasama antara laki-laki dan perempuan	Adanya kebiasaan dan sistem nilai yang membatasi kaum perempuan keluar rumah dan berorganisasi bersama laki-laki	Penafsiran ajaran agama dimana laki-laki adalah pemimpin perempuan	Tanggungjawab pencari nafkah ada pada laki-laki	Faktor personal psikologis yaitu ketakutan yang berasal dari perempuan sendiri antara lain tidak berani mengambil keputusan	Subordinasi	Kesejangan jender dalam kehidupan berkerjasama yang diakibatkan faktor sosial budaya dan personal psikologis



**FORMULASI KEBIJAKAN BARU**

LK-6

NO.	GENDER	REFORMULASI KEBIJAKAN/PROGRAM/PROYEK/KEGIATAN	RINCIAN KEBIJAKAN
1	2	3	4
	<p>Kesejangan gender dalam kehidupan berkeperasi yang melibatkan faktor sosial budaya dan personal psikologis</p>	<p>Kebijakan diubah menjadi: Pemantapan Kelembagaan dan Usaha koperasi dan UKM</p> <p>Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian pola kemitraan dan usaha koperasi</li> <li>• Peningkatan SDM koperasi</li> <li>• Fasilitasi modal koperasi</li> </ul> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temu usaha koperasi dengan Badan Usaha Lain.</li> <li>• Pelatihan bagi pengurus, pengelola dan anggota koperasi</li> <li>• Magang bagi pengelola koperasi</li> <li>• Sosialisasi/penyuluhan perkoperasian kepada anggota koperasi dan masyarakat</li> </ul>	<p>Penyediaan/pemberian bantuan pinjaman modal melalui dana bergulir dan pemerintah.</p> <p>Penumbuhan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan koperasi dengan meningkatkan pengetahuan perkoperasian melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advokasi dengan sasaran peserta tokoh masyarakat.</li> <li>• Sosialisasi/penyuluhan dengan sasaran perempuan lebih banyak dari laki-laki (70% perempuan, 30% laki-laki)</li> <li>• Pelatihan bagi anggota dan pengelola koperasi dengan sasaran peserta 70% perempuan, 30% laki-laki.</li> </ul>

Contoh:  
Penulisan Formulir Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)

IDENTIFIKASI INDIKATOR JENDER

LK-6

	KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN		TUJUAN		INDIKATOR	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
Kebijakan: Pemantapan kelengkapan usaha koperasi dan UKM	Kebijakan: Pemantapan kelengkapan usaha koperasi dan UKM	Kebijakan: Pemantapan kelengkapan usaha koperasi dan UKM	Meningkatkan sistem ekonomi kerakyatan	Menumbuhkan dan mengembangkan koperasi yang menanganai usaha simpan pinjam dan warung masyarakat termasuk koperasi wanita	Peningkatan jumlah anggota koperasi	Peningkatan jumlah perempuan anggota koperasi dari 20% menjadi 50%.
Program: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian              pola kemitraan              dan usaha              koperasi</li> <li>• Peningkatan              SDM koperasi</li> <li>• Fasilitasi Modal              koperasi</li> </ul>	Program: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian              pola kemitraan              dan usaha              koperasi</li> <li>• Peningkatan              SDM koperasi</li> <li>• Fasilitasi Modal              koperasi</li> </ul>	Program: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian              pola kemitraan              dan usaha              koperasi</li> <li>• Peningkatan              SDM koperasi</li> <li>• Fasilitasi Modal              koperasi</li> </ul>	Meningkatkan kemandirian koperasi	Menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap koperasi terutama perempuan	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola koperasi	Peningkatan jumlah perempuan pengurus koperasi dari 10% menjadi 30%

Contoh:

Penulisan Formulir Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP) (Lanjutan)

### IDENTIFIKASI INDIKATOR JENDER

1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Temu usaha koperasi dengan Badan Usaha lain</li><li>• Pelatihan pengurus, pengelola dan anggota koperasi</li><li>• Magang bagi pengelola koperasi</li><li>• Sosialisasi/penyuluhan perkoperasin kepada anggota koperasi dan masyarakat</li></ul>	<p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Temu usaha koperasi dengan Badan Usaha lain</li><li>• Pelatihan pengurus, pengelola dan anggota koperasi</li><li>• Magang bagi pengelola koperasi</li></ul>	<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan koperasi</p>	<p>Menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam koperasi</p>	<p>Pengembangan 50 koperasi simpan pinjam 20 koperasi wanita</p>	<p>Pengembangan 50 koperasi simpan pinjam, 20 koperasi yang menangani warung masyarakat. 20 koperasi wanita dari jumlah koperasi sebanyak 400).</p>

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gusti Ngurah. 1992. *Metode Penelitian Sosial: Pengertian dan Pemakaian Praktis*. Gramedia. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2001. *Indikator Gender Untuk Perencanaan Pembangunan : Pengalaman Repelita VI*. Jakarta.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour dan Toto Raharjo. 2000. *Belajar Bersama, Berperan Setara*. Yogyakarta. INSIST.
- Handayani, Titik and Kelengi Meliala. "Gender Perspective in Data Collection and Analysis" Modul Pelatihan.
- Kabeer. Naila. 1992. *Triples Roles, Gender roles, Social Relations: The Political Sub-Text of Gender Training*. Brighton: Institute of Development Studies. (Aq 114) LO: PPT-LIPI.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan R.I. 2001. *Panduan Gender dalam Perencanaan Partisipatif*. Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 2001. "Panduan Perencanaan Berperspektif Jender". Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 2002. "Buku Panduan Pendidikan Kesadaran Berbangsa". Jakarta.

Raharjo, Yulfitra. 1997. *Gender, Population and Development Concepts and Issues dalam Gender, Population and Development Staff Training Manual*. PPT LIPI and UNFPA.

Saptari, Ratna & Brigitte Holzner. 1996. *Perempuan dan Kerja*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti & Kalyanamitra.

Singarimbun, Masri. 1996. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Williams, S. J. Seed, and A. Mwau. 1994. *The Oxfam Gender Training Manual*, Oxford: Oxfam.